



RENCANA KERJA

RENJA 2020

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG



PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : /BPP/DINAS KESEHATAN/2019

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Renstra Perangkat Daerah untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi serta Arah Kebijakan teknis;
 - b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bapelitbangda tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- m. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Permendagri 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- q. Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;

- r. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10)
- y. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
- z. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman

- Menetapkan :
- aa. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman
 - ab. **PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019**

MEMUTUSKAN :

Peraturan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/U50/BPP/KEP-2017 tentang Revisi Rencana Strategis Bapelitbangda Tahun 2016-2021;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016- 2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2006-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

- mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Lampiran Renja

Pasal 3

Isi dan uraian Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kesehatan ini.

Pasal 4

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan pedoman seluruh Komponen Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang

pada tanggal : Juli 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Drs. Yutiardy Rivai, Apt

NIP. 19630905 199003 1001

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang , Juli 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Drs. Yutiardy Rivai, Apt
NIP 19630905 199003 1001

DAFTAR ISI

SK RENJA	i
HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Renstra SKPD	11
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD	85
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	86
BAB III : TUJUAN,SASARAN.PROGRAMDAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	107
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan	109
BAB IV : PENUTUP	
PENUTUP.....	115

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja

Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2020.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020. Dengan demikian, Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 serta mengingat waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2015 untuk menyusun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, maka RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2010-2015 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk Tahun 2016-2020.

Oleh Sebab itu karena tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2016 - 2020 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2010-2015, maka untuk menyusun RKPD dan Renja SKPD kita harus mempedomani :

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2019,

- 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025,
- 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,
- 5) Rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2020.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Kesehatan. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang pembangunan kesehatan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Permendagri 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 17) Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10)
- 24) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan tahun 2020 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah :

- 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyesuaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan.
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Kesehatan disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar

ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD

1. Gambaran Umum Kinerja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pembangunan kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Dinas Kesehatan adalah *Masyarakat Padang Pariaman Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan*.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kesehatan 2018, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018. Renja Dinas Kesehatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini

diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2) Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merencanakan Belanja sebesar Rp. 109.529.184.650,85 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 64.880.640.144,85
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 36.273.117.901,00
- Belanja Modal Rp. 8.150.193.005,00
- Total Belanja Rp. 109.529.184.650,85

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2018 tercatat sebesar Rp. 101.776.738.721,00. Jumlah tersebut mencapai 92,92 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 109.529.184.650,85. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E.

Dengan rincian realisasi:

- Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.61.447.560.946,00 atau 94,75%
- Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.31.954.730.470,00 atau 88,09%
- Realisasi belanja modal sebesar Rp.8.154.859.305,00 atau 100,06%

Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018

N O	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Target	Realisasi	Satuan	(RP)	RP	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Tahun	105.000.000,00	104.999.975,00	100,0 0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	Tahun	200.000.000,00	179.286.707,00	89,64
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	1	Tahun	767.300.000,00	764.317.000,00	99,61
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	Tahun	114.000.000,00	105.975.000,00	92,96
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	10.000.000,00	5.780.000,00	57,80
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	Tahun	36.800.000,00	34.879.150,00	94,78
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1	1	Tahun	125.000.000,00	124.999.460,00	100,0 0
8	Penyediaan Jasa Tenaga Shift Puskesmas Rawatan	1	1	Tahun	600.000.000,00	599.585.000,00	99,93
9	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1	1	Tahun	163.300.000,00	147.300.000,00	90,20
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	1	Tahun	84.550.000,00	84.504.100,00	99,95
11	Pengadaan Mebeleur	1	1	Tahun	50.000.000,00	49.999.200,00	100,0 0
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	Tahun	165.000.000,00	164.897.545,00	99,94
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	1	Tahun	100.000.000,00	95.255.230,00	95,26
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	1	Tahun	20.000.000,00	19.993.036,00	99,97
15	Rehab Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional	1	1	Tahun	18.000.000,00	18.000.000,00	100,0 0
16	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset	1	1	Tahun	50.000.000,00	49.968.705,00	99,94
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	99.746.161,00	99.672.018,00	99,93

RENCANA KERJA 2020

18	Penataan Administrasi Kepegawaian	1	1	Tahun	30.000.000,00	29.667.800,00	98,89
19	Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Penyusunan Sumberdaya Manusia Kesehatan	1	1	Tahun	14.500.000,00	14.404.000,00	99,34
20	Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1	Tahun	25.100.000,00	24.533.500,00	97,74
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Tahun	74.367.000,00	74.231.232,00	99,82
22	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	Tahun	57.125.000,00	57.123.100,00	100,00
23	Verifikasi dan Rekonsiliasi Keuangan	1	1	Tahun	75.000.000,00	74.895.100,00	99,86
24	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	1	Tahun	0,00	0,00	0,00
25	Peningkatan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas	1	1	Tahun	10.402.700,00	10.267.000,00	98,70
26	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	1	1	Tahun	3.537.842.000,00	3.460.038.062,00	97,80
27	Administrasi Kegiatan DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	1	Tahun	10.000.000,00	8.015.800,00	80,16
28	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	1	Tahun	9.000.000,00	7.932.100,00	88,13
29	Peningkatan pelayanan kesehatan Bencana	1	1	Tahun	6.000.000,00	5.125.000,00	85,42
30	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK non Fisik)	1	1	Tahun	824.386.000,00	774.113.082,00	93,90
31	Jaminan Persalinan (DAK non Fisik)	1	1	Tahun	3.466.435.000,00	544.540.540,00	15,71
32	Penilaian fasilitas kesehatan tingkat I dan tenaga kesehatan	1	1	Tahun	31.747.500,00	31.732.500,00	99,95
33	Pelaksanaan kegiatan pekan olah raga propinsi	1	1	Tahun	58.205.000,00	58.174.080,00	99,95
34	Peningkatan kapasitas petugas pengelola rujukan ditingkat puskesmas dan rumah sakit	1	1	Tahun	12.700.000,00	12.655.000,00	99,65
35	Peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis dan supervise rumah sakit tindak lanjut di	1	1	Tahun	5.940.000,00	5.923.000,00	99,71

	tingkat rumah sakit						
36	Workshop Audit Akreditasi Rumah Sakit	1	1	Tahun	500.000,00	497.500,00	99,50
37	Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga	1	1	Tahun	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
38	Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	1	1	Tahun	7.100.500,00	6.854.000,00	96,53
39	Pencegahan gangguan indera fungsional	1	1	Tahun	13.760.000,00	12.365.000,00	96,90
40	Pengawasan alat kesehatan dan PKRT	1	1	Tahun	21.100.000,00	21.006.900,00	99,56
41	Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan puskesmas	1	1	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
42	Pelayanan kesehatan Papa Tangkas Gada	1	1	Tahun	276.047.300,00	237.896.000,00	86,18
43	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Dibidang Obat dan Makan	1	1	Tahun	10.000.000,00	9.754.500,00	97,55
44	Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	Tahun	10.000.000,00	8.984.100,00	89,84
45	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di Puskesmas, Bindes, Toma dan Kader	1	1	Tahun	16.700.000,00	16.688.000,00	99,93
46	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	Tahun	53.000.000,00	52.693.600,00	99,42
47	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat	1	1	Tahun	39.500.000,00	39.312.548,00	99,53
48	Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan kesehatan tradisional	1	1	Tahun	14.000.000,00	13.999.900,00	100,00
49	Peningkatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	1	1	Tahun	8.500.000,00	8.498.500,00	99,98
50	Pembinaan pengembangan TOGA dalam penggunaan obat tradisional	1	1	Tahun	12.800.000,00	12.797.800,00	99,98
51	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	1	1	Tahun	6.470.200,00	6.460.000,00	99,84
52	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	1	1	Tahun	29.150.800,00	29.142.000,00	99,97
53	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	1	1	Tahun	4.476.000,00	4.476.000,00	100,00

RENCANA KERJA 2020

54	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
55	Surveilans Kualitas Air	1	1	Tahun	8.492.000,00	8.492.000,00	100,00
56	Replika Pamsimas	1	1	Tahun	5.577.000,00	5.560.000,00	99,70
57	Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat	1	1	Tahun	28.750.000,00	27.480.000,00	95,58
58	Nagari Bebas Jentik	1	1	Tahun	11.000.000,00	10.990.000,00	99,91
59	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1	1	Tahun	77.972.600,00	77.025.751,00	98,79
60	Peningkatan Imunisasi	1	1	Tahun	47.458.000,00	46.564.866,00	98,12
61	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1	1	Tahun	11.908.600,00	11.907.650,00	99,99
62	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	1	Tahun	15.150.000,00	14.839.500,00	97,95
63	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan	1	1	Tahun	42.700.000,00	42.700.000,00	100,00
64	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1	1	Tahun	2.320.000.000,00	2.170.980.039,00	93,69
65	Pembangunan Puskesmas	1	1	Tahun	118.000.000,00	117.865.000,00	99,89
66	Kegiatan Pengadaan Peningkatandan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	1	Tahun	5.003.511.000,00	4.641.228.400,00	92,76
67	Administrasi Kegiatan DAK Sarana Puskesmas	1	1	Tahun	290.000.000,00	276.812.500,00	95,45
68	Pembangunan Tempat Parkir Dinas Kesehatan	1	1	Tahun	60.000.000,00	59.642.626,00	99,40
69	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) Penugasan	1	1	Tahun	750.571.000,00	671.566.906,00	89,47
70	Pembangunan Polindes (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2018)	1	1	Tahun	0,00	0,00	0,00
71	Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKS Sakato)	1	1	Tahun	4.628.409.600,00	3.857.008.000,00	83,33
72	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	Tahun	30.000.000,00	27.987.650,00	93,29
73	Jaminan pelayanan kesehatan Papa Tangkas Gada 119	1	1	Tahun	54.075.000,00	4.075.000,00	7,54
74	Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	1	1	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00

75	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1	1	Tahun	17.000.000,00	16.975.000,00	99,85
76	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja	1	1	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
77	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	1	1	Tahun	6.000.000,00	5.975.000,00	99,58
78	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	Tahun	21.276.000,00	21.275.805,00	100,00
	JUMLAH				206.075.000,00	205.755.300,00	99,84

ADMINISTRASI PERKANTORAN

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	100,000,000,00	99,712,969,00	99
2	Batu Basa	1	1	Tahun	99,000,000,00	96,601,230,00	97
3	Gasam Gadang	1	1	Tahun	103,000,000,00	102,316,78,009	99,34
4	Ketaping	1	1	Tahun	95,000,000,00	94,472,696,00	99,44
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	107,000,000,00	106,899,252,00	99,91
6	Kampung Guci	1	1	Tahun	100,000,000,00	99,335,750,00	99,34
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	100,000,000,00	99,528,150,00	99,53
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	112,000,000,00	110,669,178,00	98,81
9	Limau Purut	1	1	Tahun	90,000,000,00	88,606,600,00	98,45
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	107,000,000,00	104,978,650,00	98,11
11	Padang Alai	1	1	Tahun	116,000,000,00	113,649,13,00	97,97
12	Padang Sago	1	1	Tahun	108,000,000,00	103,948,354,00	96,25
13	Pakandangan	1	1	Tahun	98,000,000,00	97,173,579,00	99,16
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	107,000,000,00	106,572,592,00	99,6
15	Patamuan	1	1	Tahun	90,000,000,00	88,670,52,00	98,52
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	115,000,000,00	114,777,964,00	99,81
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	115,000,000,00	112,994,450,00	98,26
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	107,000,000,00	104,132,938,00	97,32
19	Sicincin	1	1	Tahun	142,000,000,00	140,687,375,00	99,08
20	Sikabu	1	1	Tahun	108,000,000,00	107,736,949,00	99,76
21	Sintuk	1	1	Tahun	98,000,000,00	97,954,850,00	99,95
22	Ulakan	1	1	Tahun	103,000,000,00	102,364,047,00	99,38
23	Pauh Kambar	1	1	Tahun	107,000,000,00	105,816,327,00	98,89
24	Ampalu	1	1	Tahun	108,000,000,00	103,642,760,00	95,97
25	IFK	1	1	Tahun	275,000,000,00	272,819,787,00	99,21
26	Sikucur	1	1	Tahun	90.000.000,00	89.797.335,00	99,97

RENCANA KERJA 2020

27	Labkesda	1	1	Tahun	95.000.000,00	77.854.600,00	81,95
	Jumlah				2,626,500,000	2,585,529,204	98,44

BLUD PUSKESMAS

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	273,426,440,00	244,304,134,00	89,00
2	Batu Basa	1	1	Tahun	785,000,000,00	836,498,418,00	106,00
3	Gasam Gadang	1	1	Tahun	523,000,000,00	237,032,482,00	45,00
4	Ketaping	1	1	Tahun	568,256,000,00	331,070,621,00	58,00
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	475,000,000,00	488,022,720,00	102,00
6	Kampung Guci	1	1	Tahun	255,000,000,00	225,869,449,00	88,00
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	294,000,000,00	282,997,375,00	96,00
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	500,000,000,00	457,962,795,00	91,00
9	Limau Purut	1	1	Tahun	349,145,287,00	286,649,232,00	82,00
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	954,500,000,00	1,160,647,844,00	121,00
11	Padang Alai	1	1	Tahun	170,000,000,00	147,626,250,00	86,00
12	Padang Sago	1	1	Tahun	460,000,000,00	250,793,850,00	54,00
13	Pakandangan	1	1	Tahun	607,000,000,00	749,759,816,00	123,00
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	844,044,750,00	643,706,256,00	76,00
15	Patamuan	1	1	Tahun	742,207,850,00	660,651,518,00	89,00
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	610,000,000,00	592,826,564,00	97,00
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	1,470,000,000,00	1,393,766,153,00	94,00
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	870,420,040,00	721,397,790,00	82,00
19	Sicincin	1	1	Tahun	350,000,000,00	320,382,362,00	91,00
20	Sikabu	1	1	Tahun	286,792,000,00	227,618,904,00	79,00
21	Sintuk	1	1	Tahun	882,050,000,00	877,069,662,00	99,00
22	Ulakan	1	1	Tahun	761,382,750,00	729,067,150,00	95,00
23	Pauh Kamar	1	1	Tahun	1,113,660,800,00	1,112,817,169,00	99,00
24	Ampalu	1	1	Tahun	569,000,000,00	319,808,500,00	56,00
25	Sikucur	1	1	Tahun	293,294,700,00	170,330,000,00	58,00
	Jumlah				16.007.180.617,00	13.468677014,00-	89,00-

DAK NON FISIK BOK

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	580.000.000,00	488,514,150,00	8,00
2	Batu Basa	1	1	Tahun	750,000,000,00	587,107,500,00	78,28
3	Gasam Gadang	1	1	Tahun	500,000,000,00	396,178,400,00	79,24
4	Ketaping	1	1	Tahun	460,000,000,00	459,980,100,00	100
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	431,962,000,00	332,188,400,00	76,9

6	Kampung Guci	1	1	Tahun	325,000,000,00	301,417,400,00	92.74
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	450,000,000,00	372,716,000,00	82.83
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	450,000,000,00	394,312,537,00	87.63
9	Limau Purut	1	1	Tahun	380,000,000,00	312,906,500,00	82.34
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	800,000,000,00	704,143,500,00	88.02
11	Padang Alai	1	1	Tahun	350,000,000,00	304,621,000,00	87.03
12	Padang Sago	1	1	Tahun	360,000,000,00	286,581,800,00	79.01
13	Pakandangan	1	1	Tahun	630,000,000,00	524,824,300,00	83.31
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	850,000,000,00	665,765,980,00	78.33
15	Patamuan	1	1	Tahun	550,000,000,00	441,327,000,00	80.24
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	480,000,000,00	479,987,900,00	100
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	830,000,000,00	760,135,000,00	91.58
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	650,000,000,00	627,908,000,00	96.6
19	Sicincin	1	1	Tahun	470,000,000,00	470,000,000,00	100
20	Sikabu	1	1	Tahun	350,000,000,00	308,207,500,00	88.06
21	Sintuk	1	1	Tahun	570,000,000,00	555,152,500,00	97.40
22	Ulakan	1	1	Tahun	600,000,000,00	435,376,800,00	72.56
23	Pauh Kamar	1	1	Tahun	730,000,000,00	690,180,700,00	94.55
24	Ampalu	1	1	Tahun	470,000,000,00	421,512,900,00	89.68
25	IFK	1	1	Tahun	73,501,000,00	66,069,570,00	89.89
26	Sikucur	1	1	Tahun	600,000,000,00	494,425,600,00	82.40
	Jumlah				13,690,463,000,00	11,881,541,037	86.00

REKAPITULASI REALISASI KINERJA EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

S/D TAHUN 2017 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02 . 1.02.01.01 . 01	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan								
1.02 . 1.02.01.01 . 01.01	1 Penyedia jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan ATK, materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 01.02	2	Penyedia jas komunikasi & sumber daya air, listrik	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran (alat alat listrik, listrik dan internet)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.07	3	Penyedia jasa Adm keuangan	Tersedianya dana untuk honorarium PA, KPA, Bendahara, PPTK	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.08	4	Penyedia jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.15	5	Penyedia bahan bacaan perundang2 an	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.17	6	Penyedia makan minum	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.18	7	Rapat2 koordinasi konsul luar daerah	Tersedianya dana untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.20	8	Penyediaan jasa tenaga shift puskesmas rawatan	Tersedianya jasa tenaga shift Puskesmas rawatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 01.21	9	Penyedia jasa pendukung adm perkantoran	Tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 02	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia								
1.02 . 1.02.01.01 . 02.05	1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk promosi kesehatan dan penanganan fogging	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 02.09	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 02.10	3	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 02.22	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan yang ada di gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 02.24	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang ada dikantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 02.28	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan yang ada di gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 02.44	7	Rehap Sedang/Berat Kendaraan Dinas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 02.46	8	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 05	III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kualitas sumber daya manusia aparatur								
1.02 . 1.02.01.01 . 05.03	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya dana untuk bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kementerian dan pemerintah pusat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 05.04	2	Penataan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pertemuan penataan kepegawaian untuk Dinas Kesehatan/ Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 05.10	3	Peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas secara teknis	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 05.08	4	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penyusunan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terdokumennya data jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan Permenkes 33 tahun 2015	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 05.09	5	Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jml tenaga kes di fasyankes pemerintah dan swasta yang mempunyai SIP	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 06	IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan								
1.02 . 1.02.01.01 . 06.01	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 06.09	2	Penyusunan perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya pertemuan rencana usulan kegiatan Puskesmas dari berbagai sumber anggaran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 06.10	3	Verifikasi dan Rekonsiliasi Keuangan	Tersusunnya pengawasan dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 15	V	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Outcome : Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas								
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan								

			Kefarmasian								
			Persentase obat Rusak dan kadaluarsa yang Dihapuskan								
1.02 . 1.02.01.01 . 15.07	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas	Terlaksananya workshop pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas.	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 15.08	2	Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan (DAK)	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 15.10	3	Administrasi Kegiatan DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya biaya administrasi dan operasional dalam rangka pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 15.04	4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya workshop standar pelayanan kefarmasian	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 15.05	5	Peningkatan mutu Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pemusnahan obat yang kadaluarsa dan rusak	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 .	VI	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Universal Coverage Visit Rate								

16											
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Mutu Alat Kesehatan								
			Persentase Realisasi Administrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Belanja Operasional Kesehatan Lainnya								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.09	1	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya indikator kepuasan masyarakat (IKM) untuk Puskesmas se Kab. Padang Pariaman	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya mobile terpadu berbasis informasi teknologi (perangkat promkes)								
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan Puskesmas								
			Terlaksananya pelayanan kesehatan								

			haji, gigi dan mulut.								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.23	2	Peningkatan pelayanan kesehatan bencana	Terbentuknya tim bencana disetiap Puskesmas siaga bencana	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terampilnya tenaga tim siaga bencana dalam memberikan pelayanan korban bencana								
			Tersusunnya rencana konsolidasi bencana yang tergabung dalam BPBD								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.	3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Terlaksananya upaya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.26	4	Jaminan Persalinan	Tersedianya rumah tunggu untuk persalinan diwilayah Kab. Padang Pariaman	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.48	5	DAK Non Fisik Sekunder	Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 16.50	6	DAK Non Fisik Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik di Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.	7	BOK Distribusi Obat dan E Logistik	Terlaksananya pendistribusian obat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.	8	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tenaga Kesehatan	Terpilihnya Puskesmas dan tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32	9	Peningkatan kapasitas petugas pengelola rujukan ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.33	10	Peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis dan supervisi rumah sakit tindak lanjut ditingkat rumah sakit	Tercapainya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 .	11	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya kegiatan Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

16.35			Kerja dan kesehatan Olah raga								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.36	12	Peningkatan Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Tercapainya cakupan puskesmas bebas pasung	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya Workhsop tentang kesehatan Jiwa								
			Terlaksananya Workhsop pengaruh narkoba terhadap kesehatan								
			Terlaksananya supervisi dan bimbingan teknis program PTM								
			Pemeriksaan Narkoba terhadap pejabat di lingkungan Pemda								
			Tersedianya ATK dan Sarana Pendukung untuk Pelaksanaan program pencegahan penyakit tidak menular								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.41	13	Pencegahan Gangguan Indera Fungsional	Tercapainya cakupan masyarakat yang Operasi Katarak	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

			Terlaksananya workshp mengenai gangguan indera fungsional								
			Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat tidak mampu								
			Terlaksananya workshp peningkatan kapasitas SDM pemegang program Mata								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.42	14	Pengawasan Alat kesehatan dan PKRT	Terlaksananya Pengelolaan ASPAK di Puskesmas secara maksimal dan alat kesehatan terinventaris dan terdokumentasi dengan baik dan benar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Tercapainya standar alat kesehatan di Puskesmas								
			Terlaksananya Kalibarsi Alat Kesehatan di Puskesmas								
			Terlaksananya pengawasan PKRT								
			Tercapainya dokumen perizinan untuk PKRT								

			Tercapainya pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas dengan baik								
			Terlaksanya Supervisi dan Bimbingan Teknis terhadap penatalaksanaan Alkes di puskesmas								
			Terlaksananya Petemuan tentang penggunaan dan pengoperasian Aplikasi ASPAK								
			Terlaksananya Pertemuan Evaluasi pengelolaan alkes di puskesmas								
			Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Alkes dan PKRT serta Kalibrasi Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas								
			Terlaksanya Monev terhadap penatalaksanaan pengawasan								

			PKRT								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.43	15	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Puskesmas	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan per regional di Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.44	16	Pelayanan Kesehatan Papa Tangkas Gada 119	Terlaksananya pertemuan Papa Tangkas Gada 119	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Tersedianya sistem komunikasi, alat kesehatan dan GPS disetiap Puskel PSC Papa Tangkas Gada di tiap tiap Puskesmas								
			Tersedianya alat kesehatan (emergency kit) di Puskel PSC papa Tangkas Gada 119								
			Terlaksananya operasional Papa Tangkas Gada 19								
			Tersedianya penambahan dan perpanjangan aplikasi PSC Papa Tangkas Gada 119								
1.02 . 1.02.01.01 .	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk JKN	Terlaksananya pelayanan kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

16.		(Dana Kapitasi)	bagi peserta JKN								
1.02 . 1.02.01.01 . 16.	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk JKN (Dana Non Kapitasi)	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 16.30	19	Pelayanan Keluarga sehat	Terlaksananya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi PIS PK								
1.02 . 1.02.01.01 . 17		VII Program Pengawasan Obat dan Makanan	Outcome :Persentase Apotek yang Memenuhi Syarat								
			Outcome : Persentase Toko Obat yang Memenuhi Syarat								
			Outcome : Persentase P-IRT yang Menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT)								
1.02 . 1.02.01.01 . 17	1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan	Terlaksananya pertemuan penyuluhan Cara Produksi Pangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

		makanan	Yang Baik								
			Terlaksananya sosialisasi pemilihan Pangan yang Baik								
			Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi PIRT								
1.02 . 1.02.01.01 . 17.03	2	Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengawasan Toko Obat dan Apotek, Mini Market, Toko Kosmetik, Salon, Barber Shop, Fitness	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Melakukan pengawasan apotek								
			Melakukan Pengawasan Toko Obat								
			Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi toko obat dan apotek								
1.02 . 1.02.01.01 . 19	VIII	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Outcome : Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup								

			Bersih dan Sehat								
			Outcome : Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional								
			Outcome : Cakupan Penyebaran Informasi Kesehatan Rumah Sakit								
1.02 . 1.02.01.01 . 19.	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di Puskemas, Bides, Toma dan Kader	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
1.02 . 1.02.01.01 . 19.	Pengembangan dan peningkatan pelayanan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
		Tersedianya profil Dinas Kesehatan									
1.02 . 1.02.01.01 . 19.09	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya media promosi dan sosialisasi tentang sandar hidup sehat (leaflet, CD, spanduk dll)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	

			Terlaksananya pembinaan PHBS, regional Puskesmas, nagari siaga, KSI, tenaga penyuluh								
			Terlaksananya survey PHBS dan meningkatnya jumlah rumah tangga dan korong PHBS								
			Terlaksananya pertemuan dengan petugas Promkes								
			Terlaksananya talkshow di radio dan iklan spot tentang Promosi Kesehatan (TV dan radio)								
1.02 . 1.02.01.01 . 19.10		Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional	Terlaksananya pertemuan pengelola kesehatan tradisional, komplementer dan wilayah kerja Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 19.11		Peningkatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya program akupressur pada pada kelompok asuhan mandiri	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Workshop pelayanan kesehatan								

			tradisional akupresure								
			Terlaksananya pertemuan asuhan mandiri kesehatan tradisional								
1.02 . 1.02.01.01 . 19.12		Pembinaan Pengembangan TOGA dalam penggunaan obat tradisional	Terlaksananya lomba pemamfaatan TOGA dan akupresure di tingkat Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 19.		Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan tradisonal, komplementer diwilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Kesehatan Tradisional								
		IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Outcome : Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan								
			Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)								

	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Tersusunnya peta informasi masyarakat kurang gizi dan diketahuinya status gizi balita	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		Terlaksananya pertemuan sosialisasi gizi								
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Pemberian PMT Pemulihan pada Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan PMT Bumil KEK dan MP ASI pada baduta Gakin	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		Terlaksananya pertemuan tentang makanan tambahan								
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya pertemuan pencapaian keluarga sadar gizi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program gizi	Terlaksananya monitoring fasilitatif kegiatan PMBA dan KP ASI	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		Terlaksananya pertemuan review program								

1.02 . 1.02.01.01 . 21	X	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Outcome : Cakupan Korong yang Melaksanakan STBM								
			Cakupan Keluarga yang Memiliki / Memakai Air Bersih								
			Cakupan Keluarga yang Memiliki / Memakai Jamban Sehat (Akses Sanitasi)								
			Cakupan Nagari Siaga Aktif								
1.02 . 1.02.01.01 . 21.08		Survalians Kualitas Air	Jumlah sampel air bersih yang dimbil kelokasi dan dikirim ke labkesda	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 21.09		Replikasi Pamsimas	Terpantaunya pengguna air bersih dan sarana sanitasi dimasyarakat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 21.07		Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat	Terlaksananya pertemuan dalam rangka Kabupaten Sehat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 21.12		Nagari Bebas Jentik	Meningkatnya kesehatan lingkungan dari jentik nyamuk	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 21.22	XI	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung								
			Persentase Puskesmas Dalam Mempertahankan Prevalensi Obesitas								
			Persentase Kab. Yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok								
			Persentase Korong yang Mencapai UCI (universal child immunization)								
1.02 . 1.02.01.01 . 21.		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya kegiatan pertemuan RVS Kusta, KPD Kusta, OJT Kusta, POD Kusta, TB, HIV AIDS, DBD, Diare, ISPA dan monev program P2P	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya penemuan kasus baru kusta tanpa cacat								

			Terlaksananya keberhasilan pengobatan TB Paru secara cepat								
			Terlaksananya penemuan kasus HIV-AIDS								
			Terlaksananya pengetahuan HIV-AIDS pada anak umur > 15 tahun								
			Terlaksananya kegiatan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS di Puskesmas								
			Terlaksananya kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko								
			Terlaksananya penemuan kasus diare per 1000 penduduk								
			Terlaksananya penemuan kasus baru kusta secara dini								

1.02 . 1.02.01.01 . 21.08	Peningkatan imunisasi	Outcome : Meningkatnya cakupan imunisasi dasar pada bayi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi (UCI) pada tingkat korong								
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi								
		Outcome : Tersedianya cakupan BIAS campak pada anak SD/MI kelas I								
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi DT, TD, BIAS pada anak SD/MI kelas 1, 2, 3								
		Outcome : Tercapainya imunisasi TT2 + WUS 85%								
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi lanjutan pada balita								

			Terlaksananya monev imunisasi Puskesmas di Puskesmas								
			Terlaksananya pertemuan imunisasi MR tingkat Puskesmas dan Kecamatan								
			Terlaksananya pertemuan sosialisasi MR tingkat Kab dan Kec								
1.02 . 1.02.01.01 . 21.09		Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Outcome : AFP rate pada anak usia kurang dari 15 tahun 2/100.000 dan penanganan KLB dalam kurun waktu 24 jam	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Outcome : Cakupan desa/kelurahan/korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam								
			Outcome : Terlacaknya setiap kasus PD3I atau kejadian penyakit yang mengakibatkan								

			wabah atau kejadian luar biasa (KLB)								
			Outcome : Respon sinyal kewaspadaan dalam SKDR								
			Terlaksananya monev KLB di Puskesmas								
			Terlaksananya pelacakan KLB								
			Terlaksananya pengambilan spesimen campak dan mengantarkan ke propinsi								
1.02 . 1.02.01.01 . 21.14		Pengendalian penyakit tidak menular	Outcome : Meningkatnya cakupan puskesmas yang melaksanakan PTM Terpadu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Out come : Meningkatnya cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM								

			Outcome : Meningkatnya persentase perempuan usia 30 - 50 th yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara										
			Outcome : Meningkatnya cakupan kawasan tanpa rokok (KTR), minimal 50 % sekolah										
			Terlaksananya monev program PTM tingkat Kabupaten										
			Terlaksananya workshsop peningkatan kapasitas SDM penanggung jawab program PTM										
			Terlaksananya Workshsop pengaruh rokok terhadap kesehatan Jantung										
			Terlaksananya workshsop kanker serviks dan pemeriksaan IVA di tingkat Kabupaten										
			Terlaksananya supervisi dan										

			bimbingan teknis program PTM								
			Terlaksananya peningkatan kapasitas kader posbindu puskesmas								
			Tersedianya ATK dan Sarana Pendukung untuk Pelaksanaan program pencegahan penyakit tidak menular								
			Tersedianya blanko skreening Faktor resiko PTM /KMS FR-PTM								
			Terlaksanya Supervisi dan Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian PTM di Puskesmas								
			Tersedianya carta Prediksi Resiko WHO (SEAR B)								
			Tersedianya leaflet , baner, spanduk PTM								
1.02 . 1.02.01.01 .		Pengendalian penyakit bersumber binatang	Outcome : Meningkatnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

21.16			pengendalian penyakit bersumber binatang								
			Terlaksananya sosialisasi pengendalian penyakit bersumber binatang								
			Terlaksananya penemuan kasus malaria per 100 penduduk								
			Terlaksananya penemuan kasus DBD per 100 penduduk								
			Terlaksananya kegiatan eliminasi rabies								
			Terlaksananya sosialisasi kegiatan penanggulangan penyakit filariasis dan kecacingan								
			Tersedianyan mesin fogging								
1.02 . 1.02.01.01 . 23		XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Outcome : Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan								

1.02 . 1.02.01.01 . 23.02	1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya reakreditasi Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 23.10	2	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan Puskesmas paska akreditasi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terakreditasi ulangnya Puskesmas yang telah 3 tahun								
1.02 . 1.02.01.01 . 25	XIII	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Outcome : Rasio Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) Persatuan Penduduk								
1.02 . 1.02.01.01 . 25		Pagar Dinas Kesehatan	Terlaksananya pembangunan Pagar Dinas Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 25.24		Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 25.		Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 25.25		Administrasi kegiatan DAK pembangunan sarana prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 25		Pengadaan Alat Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan untuk puskesmas (kursi gigi, hematologi analizer dan cryoterapi kit)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 28	XIV	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Outcome : Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan								
			Outcome : Persentase masyarakat yang terjamin pelayanan kesehatan								
1.02 . 1.02.01.01 . 28.01		Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKS Sakato)	Terjaminnya masyarakat miskin Kabupaten Padang Pariaman pada program JKN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 28.08		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan pelayanan kesehatan	Terlaksananya evaluasi, monitoring dan pelaporan kemitraan pelayanan kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

1.02 . 1.02.01.01 . 28.10		Jaminan Pelayanan Kesehatan Papa Tangkas Gada 119	Terjaminnya masyarakat yang gawat darurat dilingkungan Kab. Padang Pariaman	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 28		Operasional P3K	Terjaminnya Peserta event dalam beberapa kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 30	XV	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia									
1.02 . 1.02.01.01 . 30.01		Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Terbentuknya kelompok kerja lansia tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terbentuknya Puskesmas Santun Lansia dan Puskesmas Ramah Lansia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terbentuknya tiap nagari satu posyandu percontohan lansia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya monev lansia	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 32	15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Outcome : Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)								
			Cakupan Persalinan di Fasilitas								

			Kesehatan								
			Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)								
			Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Makanan Tambahan								
1.02 . 1.02.01.01 . 32.11		Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas	Terlaksananya workshop penanganan komplikasi terhadap ibu hamil, persalinan dan nifas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya pertemuan sosialisasi ANC terpadu dan buku KIA pada lintas sektor dan lintas program								
			Terlaksananya pertemuan AMP dan audit medik KB								
			Terlaksananya monitoring dan								

			evaluasi								
1.02 . 1.02.01.01 . 32.05		Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja	Terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor penjaringan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terdeteksi kesehatan anak usia sekolah dan remaja								
			Terlaksananya lomba sekolah tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional								
1.02 . 1.02.01.01 . 32.06		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Terlatihnya petugas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan remaja	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terdeteksinya masalah remaja (SMP dan SMA) berkaitan dengan perilaku resiko Napza, Kesehatan Produksi dan IMS/ HIV AIDS)								
			Tersosialisasinya standar nasional PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli								

			Remaja)								
			Terlatihnya kader kesehatan remaja SMP dan SMA sederajat 10 % dari jumlah murid								
1.02 . 1.02.01.01 . 32.10		Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB	Terlaksananya pertemuan dengan lintas sektor (PKK, KB Kes, TNI KB Kes, IBI KB Kes)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
1.02 . 1.02.01.01 . 32.09		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pertemuan pembentukan forum peduli KIA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Terlaksananya program papa sehat								
			Terlaksananya program papa dorda								
			Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA dan penguatan sistem pelayanan di fasilitas kesehatan								
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAPA Sehat								
			Terlaksananya review DDTK,								

			MTBM/S dan pembinaan program																	

3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp.2.105.681.435,00 dengan realisasi Rp.2.094.804.527,00.

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 99,48%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Target	Realisasi	Satuan	(RP)	RP	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Tahun	105.000.000,00	104.999.975,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	Tahun	200.000.000,00	179.286.707,00	89,64
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	1	Tahun	767.300.000,00	764.317.000,00	99,61
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	Tahun	114.000.000,00	105.975.000,00	92,96
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	10.000.000,00	5.780.000,00	57,80
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	Tahun	36.800.000,00	34.879.150,00	94,78
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1	1	Tahun	125.000.000,00	124.999.460,00	100,00
8	Penyediaan Jasa Tenaga Shift Puskesmas Rawatan	1	1	Tahun	600.000.000,00	599.585.000,00	99,93
9	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1	1	Tahun	163.300.000,00	147.300.000,00	90,20
	JUMLAH				2.121.400.000,00	2.067.122.292,00	97,44

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Rp. 105.000.000,00 dengan realisasi Rp.104.999.975,00 atau sebesar 100%.

Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor dan lancarnya proses surat menyurat serta administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan dan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2018 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat ATK, barang cetakan, penggandaan, perengko dan

materai.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran Rp.200.000.000,00 dengan realisasi Rp.179.286.707,00 atau sebesar 89,64%.

Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana listrik dan langganan TV kabel kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor dan hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah lancarnya operasional kegiatan dinas selama tahun 2018.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Anggaran Rp.767.300.000,00 dengan realisasi Rp.764.317.000,00 atau sebesar 99,61%. Kegiatan ini dimaksudkan merupakan penyediaan honor pengelola keuangan SKPD seperti Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Gaji, Bendahara Barang dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya tahun 2015.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran Rp. 114.000.000,00 dengan realisasi Rp.105.975.000,00 atau sebesar 92,96%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor, serta belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Selama tahun 2018 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Rp.10.000.000,00 dengan realisasi Rp.5.780.000,00 atau sebesar 57,80%. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama tahun anggaran 2018 dari kegiatan ini dapat disediakan bahan bacaan berupa surat kabar/koran harian lokal sebanyak 6 (enam) macam surat kabar.

6. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran Rp. 36.800.000,00 dengan realisasi Rp.34.879.150,00 atau sebesar 94,78%.

Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama tahun 2018 dapat

disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Anggaran Rp.125.000.000,00 dengan realisasi Rp.124.999.460,00 atau sebesar 100%. Selama tahun anggaran 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. Penyediaan Jasa Tenaga Shift Puskesmas Rawatan

Anggaran Rp.600.000.000,00 dengan realisasi Rp.599.585.000,00 atau sebesar 99,93%. Penyediaan jasa tenaga shift rawatan dimaksud untuk pembayaran insentif dokter jaga dan paramedis puskesmas rawatan agar dapat menunjang pelaksanaan pelayanan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

9. Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran

Anggaran Rp163.300.000,00 dengan realisasi Rp.147.300.000,00 atau sebesar 90,20 %. Kegiatan Penyediaan Jasa PendukungPerkantoran terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran jasa pengamanan kantor, jasa clearning service dan pakaian kerja.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran sebesar Rp.487.550.000,00 dengan realisasi Rp. 482.617.816,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 98,99% dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	1	Tahun	84.550.000,00	84.504.100,00	99,95
2	Pengadaan Mebeleur	1	1	Tahun	50.000.000,00	49.999.200,00	100,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	1	Tahun	165.000.000,00	164.897.545,00	99,94
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	1	Tahun	100.000.000,00	95.255.230,00	95,26
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	1	Tahun	20.000.000,00	19.993.036,00	99,97
6	Rehab Sedang/Berat kendaraan dinas/operasional	1	1	Tahun	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
7	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset	1	1	Tahun	50.000.000,00	49.968.705,00	99,94
	JUMLAH				487.550.000,00	482.617.816,00	98,99

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Anggaran Rp. 84.550.000,00 dengan realisasi Rp. 84.504.100,00 atau sebesar 99,95%. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu 5 (lima) unit Televisi untuk Papa Tangkas Gada PSC 119, 4 (empat) unit PC untuk sekretariat dan bidang P2P, 9 (sembilan) unit printer yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pengadaan Mebeleur

Anggaran Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi Rp.49.999.200,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan Pengadaan Mebeleur terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu Pembelianmeja 7 (tujuh) unit terdiri dari 2 (dua) unit di Subag Keuangan dan Pengendalian, 5 (lima) unit di Papa Tangkas Gada PSC 119 dan Kursi Staf 5 (lima)

dan kursi rapat (sembilan) unit serta 3 (tiga) unit tempat tidur petugas PSC 119 sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran Rp.165.000.000,00 dengan realisasi Rp 164.897.545,00 atau sebesar 99,94%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran Rp.100.000.000,00 dan realisasi Rp. 95.255.230,00 atau sebesar 95,26%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional SKPD terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk belanja service kendaraan, suku cadang, BBM dan pelumas, STNK serta belanja perbaikan kendaraan selama satu tahun.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Anggaran Rp.20.000.000,00 dan realisasi Rp.19.993.036,00 atau sebesar 99,97%. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, laptop, printer sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

6. Rehab Sedang/ Berat kendaraan dinas/ operasional

Anggaran Rp.18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan Rehab Sedang/Berat kendaraan cat ulang body kendaraan roda 4 (empat) Kepala Dinas, Bidang P2P dan ambulance puskesmas ketaping.

7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset

Anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.968.705,00 atau 99,94%. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 169.346.161,00 dan realisasi Rp.168.277.318,00 atau sebesar 99,37%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	99.746.161,00	99.672.018,00	99,93
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	1	1	Tahun	30.000.000,00	29.667.800,00	98,89
3	Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Penyusunan Sumberdaya Manusia Kesehatan	1	1	Tahun	14.500.000,00	14.404.000,00	99,34
4	Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1	Tahun	25.100.000,00	24.533.500,00	97,74
	JUMLAH				113.500.000,00	13.464.054,00	99,97

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Anggaran Rp.99.746.161,00 dan realisasi Rp.99.672.018,00 atau sebesar 99,93%. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan yang telah diikuti sertakan sebanyak 2 orang peserta dan pelaksanaan Bimtek SIA BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan.

2. Penataan Administrasi Kepegawaian

Anggaran Rp.30.000.000,00 dan realisasi Rp.29.667.800,00 atau sebesar 98,89%. Kegiatan ini telah terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan untuk keperluan administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-Kabupaten Padang Pariaman.

3. Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Penyusunan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Anggaran Rp. 14.500.000,00 dan realisasi Rp. 14.404.000,00 atau sebesar 99,34%. Kegiatan ini telah terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan .

4. Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Anggaran Rp. 25.100.000,00 dan realisasi Rp. 24.533.500,00 atau sebesar 97,74%.

Kegiatan ini telah terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Anggaran sebesar Rp. 206.492.000,00 dan realisasi Rp.206.249.432,00 atau sebesar 99,88%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	TAHUN	74.367.000,00	74.231.232,00	99,82
2.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	TAHUN	57.125.000,00	57.123.100,00	100,00
3	Verifikasi dan Rekonsiliasi Keuangan	1	1	TAHUN	75.000.000,00	74.895.100,00	99,86
	JUMLAH				206.492.000,00	206.249.432,00	99,88

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi KinerjaSKPD

Anggaran Rp. 74.367.000,00 dengan realisasi Rp.74.231.232,00 atau sebesar 99,82%.

Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu tersusunnya 5 (lima) macam laporan sebagai berikut : Penyusunan RKA, DPA, Renstra, Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ Kepala Daerah dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun.

2. Penyusunan Perencanaan dan Anggaran

Anggaran Rp. 57.125.000,00 dengan realisasi Rp. 57.123.100,00 atau sebesar 100,00% telah terlaksananya perencanaan dan penganggaran dinas/puskesmas yang efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Verifikasi dan Rekonsiliasi Keuangan

Anggaran Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi Rp. 74.895.100,00 atau sebesar 99,86% telah terlaksananya administrasi dan pembukuan keuangan dilingkungan dinas/puskesmas yang efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditargetkan.

E. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp 3.558.244.700,00 dan realisasi Rp.3.478.320.862,00 atau sebesar 97,75%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	1	TAHUN	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas	1	1	TAHUN	10.402.700,00	10.267.000,00	98,70
3	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	1	1	TAHUN	3.537.842.000,00	3.460.038.062,00	97,80
4	Administrasi Kegiatan DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	1	TAHUN	10.000.000,00	8.015.800,00	80,16
	JUMLAH				3.558.244.700,00	3.478.320.862,00	97,75

1. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Anggaran Rp. 50.000.00,00 dan realisasi Rp 0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena ada beberapa kendala yaitu : di batalkannya izin incenerator di seluruh rumah sakit di Sumatera barat sehingga pemusnahan menggunakan incenerator tidak bisa di lakukan dan pemusnahan dengan cara lain juga tidak bisa di lakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana.

2. Peningkatan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas

Anggaran Rp.10.402.700,00 dan realisasi Rp.10.267.000,00 atau sebesar 98,70%. Kegiatan ini telah dilaksanakan guna mengawasi Persediaan farmasi Puskesmas guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan selama satu tahun.

3. Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan (DAK)

Anggaran Rp.3.537.842.000,00 dengan realisasi Rp.3.460.038.062,00 atau sebesar 97,80%, kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan obat-obatan di Kabupaten Padang Pariaman. Realisasi keuangan terdiri dari : belanja obat-obatan.

4. Administrasi kegiatan DAK pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Anggaran Rp.10.000.000,00 dengan realisasi Rp. 8.015.800,00 atau sebesar 80,16%, kegiatan ini dilaksanakan untuk penunjang kegiatan pengadaan obat perbekala kesehatan. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan selama satu tahun.

F. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp.4.758.521.300,00 dan realisasi Rp.1.745.416.702,00 atau sebesar 36,68%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	(RP)	%
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	1	TAHUN	9.000.000,00	7.932.100,00	88,13
2	Peningkatan pelayanan kesehatan Bencana	1	1	TAHUN	6.000.000,00	5.125.000,00	85,42
3	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK non Fisik)	1	1	TAHUN	824.386.000,00	774.113.082,00	93,90
4	Jaminan Persalinan (DAK non Fisik)	1	1	TAHUN	3.466.435.000,00	544.540.540,00	15,71
5	Penilaian fasilitas kesehatan tingkat I dan tenaga kesehatan	1	1	TAHUN	31.747.500,00	31.732.500,00	99,95
6	Pelaksanaan kegiatan pekan olah raga propinsi	1	1	TAHUN	58.205.000,00	58.174.080,00	99,95
7	Peningkatan kapasitas petugas pengelola rujukan ditingkat puskesmas dan rumah sakit	1	1	TAHUN	12.700.000,00	12.655.000,00	99,65
8	Peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis dan supervise rumah sakit tindak lanjut di tingkat rumah sakit	1	1	TAHUN	5.940.000,00	5.923.000,00	99,71
9	Workshop Audit Akreditasi Rumah Sakit	1	1	TAHUN	500.000,00	497.500,00	99,50
10	Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga	1	1	TAHUN	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
11	Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	1	1	TAHUN	7.100.500,00	6.854.000,00	96,53
12	Pencegahan gangguan indera fungsional	1	1	TAHUN	13.760.000,00	12.365.000,00	96,90

13	Pengawasan alat kesehatan dan PKRT	1	1	TAHUN	21.100.000,00	21.006.900,00	99,56
14	Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan puskesmas	1	1	TAHUN	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
15	Pelayanan kesehatan Papa Tangkas Gada	1	1	TAHUN	276.047.300,00	237.896.000,00	86,18
	JUMLAH				4.758.521.300,00	1.745.416.702,00	78,15

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran Rp9.000.000,00 dan realisasi Rp7.932.100,00 atau sebesar 88,13%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang meliputi upaya pelayanan kesehatan haji, pelayanan peserta BPJS serta upaya pelayanan kesehatan primer.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bencana

Anggaran Rp 6.000.000,00 dan realisasi Rp.5.125.000,00 atau sebesar 85,42%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meliputi pembinaan kepada puskesmas untuk dapat membentuk tim siaga bencana bekerjasama BPBD untuk kesiapsiagaan bencana untuk memberi pertolongan saat ada bencana.

3. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK non Fisik)

Anggaran Rp824.386.000,00 dengan realisasi Rp774.113.082,00 atau sebesar 93,90%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Jaminan Persalinan (DAK non Fisik)

Anggaran sebesar Rp3.466.435.000,00 dan realisasi Rp544.540.540,00 atau sebesar 15,71 % kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK Non Fisik yaitu kegiatan peruntukannya adalah sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan untuk sewa rumah tunggu kelahiran (RTK).

5. Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat I dan Tenaga Kesehatan

Anggaran sebesar Rp31.747.500,00 dan realisasi Rp31.732.500,00 atau sebesar 99,95%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,

kegiatan meliputi penilaian terhadap manajemen puskesmas, inovasi puskesmas, tata ruang puskesmas, kebersihan puskesmas, kebersihan dan kinerja pimpinan dan staf puskesmas. Penilaian ini bertujuan untuk memberi reward dan mencari unggulan puskesmas yang dapat di ajukan mewakili ke tingkat propinsi bahkan nasional.

6. Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi

Anggaran sebesar Rp58.205.000,00 dan realiasi Rp58.174.080,00 atau sebesar 99,95%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kegiatan ini merupakan program yang membantu Disparpora untuk pelaksanaan Pekan Olah Raga Tingkat Propinsi dimana Dinas Kesehatan adalah mengkoordinir tim medis di setiap cabang olah raga selama pekan olah raga ini berlangsung.

7. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Rujukan ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit

Anggaran sebesar Rp12.700.000,00 dan realiasi Rp12.655.000,00 atau sebesar 99,65%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kegiatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan SDM, pengetahuan petugas pengelola rujukan tingkat puskesmas dan rumah sakit.

8. Peningkatan Pembinaan dan bimbingan teknis dan supervisi rumah sakit tindak lanjut di tingkat rumah sakit.

Anggaran sebesar Rp5.940.000,00 dan realiasi Rp5.923.000,00 atau sebesar 99,71%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kegiatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada pengelola program rujukan baik di tingkat puskesmas dan rumah sakit.

9. Workshop Audit Akreditasi Rumah Sakit

Anggaran sebesar Rp500.000,00 dan realiasi Rp497.500,00 atau sebesar 99,50%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

10. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Anggaran sebesar Rp 6.600.000,00 dan realiasi Rp 6.600.000,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kegiatan ini merupakan sosialisasi, konsultasi dan pembinaan pada puskesmas

terutama petugas pemegang program kesehatan kerja dan olah raga di Puskesmas Se Kabupaten Padang Pariaman

11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza

Anggaran sebesar Rp7.100.000,00 dan realiasi Rp6.854.000,00 atau sebesar 96,53%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tujuan pengendalian penyakit tidak menular penderita gangguan jiwa yang mendapat pengobatan dan tidak diterlantarkan.

12. Pencegahan Gangguan Indera Fungsional

Anggaran sebesar Rp12.760.000,00 dan realiasi Rp12.365.000,00 atau sebesar 96,90%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan merupakan cakupan persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak.

13. Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

Anggaran sebesar Rp21.100.000,00 dan realiasi Rp21.006.000,00 atau sebesar 99,56%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tujuan tercapainya pengawasan alat kesehatan di 25 puskesmas, pengawasan peredaran alat kesehatan di pasaran, pengawasan izin edar alat kesehatan di perbekalan kesehatan rumah tangga, pemberian sertifikat penyuluhan perbekalan kesehatan rumah tangga seta pengawasan ASPAK di Puskemas-Puskesmas.

14. Monitoring dan Evaluasi Progran dan Kesehatan Puskesmas

Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realiasi Rp20.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

15. Pelayanan Kesehatan Papa Tangkas Gada 119

Anggaran sebesar Rp276.047.000,00 dan realiasi Rp237.898.000,00 atau sebesar 86,18%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kegiatan ini bahwa apabila masyarakat yang di rujuk ke rumah sakit akan di tanggung biaya oleh PS 119 Papa Tangkas Gada.

G. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan realisasi Rp.18.738.600,00 atau sebesar 93,69% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Target	Realisasi	Satuan	(RP)	RP	%
1.	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Dibidang Obat dan Makan	1	1	TAHUN	10.000.000,00	9.754.500,00	97,55
2.	Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	TAHUN	10.000.000,00	8.984.100,00	89,84
	JUMLAH				20.000.000,00	18.738.600,00	93,69

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makan.

Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan realisasi Rp. 9.754.500,00 atau sebesar 97,55% kegiatan ini realisasinya kurang dari 100,00% dan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas.

2. Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.984.100,00 atau sebesar 89,84%. Maksud dan tujuan diadakan Pengawasan Obat dan makanan ini adalah agar Obat dan Makanan yang diperoleh Masyarakat sudah sesuai dengan Standar Kesehatan dan tidak merugikan masyarakat.

H Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp 144.500.000,00 dan realisasi Rp 143.990.348,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,65% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

N O	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di Puskesmas, Bindaes, Toma dan Kader	1	1	TAHUN	16.700.000,00	16.688.000,00	99,93
2	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	TAHUN	53.000.000,00	52.693.600,00	99,42
3	Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat	1	1	TAHUN	39.500.000,00	39.312.548,00	99,53
4	Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan kesehatan tradisional	1	1	TAHUN	14.000.000,00	13.999.900,00	100,00
5	Peningkatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	1	1	TAHUN	8.500.000,00	8.498.500,00	99,98
6	Pembinaan pengembangan TOGA dalam penggunaan obat tradisional	1	1	TAHUN	12.800.000,00	12.797.800,00	99,98
	JUMLAH				144.500.000,00	143.990.348,00	99,65

1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di Puskesmas, Bindaes, Toma dan Kader

Anggaran sebesar Rp16.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.688.000,00 atau sebesar 99,93%. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini meliputi pembinaan posyandu, pembinaan pemanfaatan TOGA, pembinaan Poskesren, pembinaan Nagari Siaga, pembinaan BATRA, pembinaan SBH dan penyuluhan kelompok.

2. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan

Anggaran sebesar Rp53.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.693.600,00 atau sebesar 99,42%. Maksud dan tujuan diadakan Pengembangan dan peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan ini adalah agar data dan informasi kesehatan dapat diakses secara cepat melalui Komunikasi data.

3. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Anggaran sebesar Rp39.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.312.548,00 atau sebesar 99,53%. Maksud dan tujuan diadakan Peningkatan Upaya Promosi dan Informasi Kesehatan ini adalah agar masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang cara hidup sehat melalui media informasi seperti iklan Radio Spot, televisi, cetak baliho dan cetak banner.

4. Peningkatan kapasitas pengelola pelayanan kesehatan tradisional

Anggaran sebesar Rp14.000.000,00 dan realisasi Rp13.999.900,00 atau sebesar 100,00% kegiatan ini realisasinya kurang dari 100,00% dan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas.

5. Peningkatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat

Anggaran sebesar Rp8.500.000,00 dan realisasi Rp8.498.500,00 atau sebesar 99,98% kegiatan ini realisasinya kurang dari 100,00% dan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas.

6. Pembinaan pengembangan TOGA dalam penggunaan obat tradisional

Anggaran sebesar Rp12.800.000,00 dan realisasi Rp12.797.800,00 atau sebesar 99,98% kegiatan ini realisasinya kurang dari 100,00% dan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas.

I. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp48.097.000,00 dan realisasi Rp48.078.00,00 atau sebesar 99,98% Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,96% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	1	1	TAHUN	6.470.200,00	6.460.000,00	99,84
2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	1	1	TAHUN	29.150.800,00	29.142.000,00	99,97
3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	1	1	TAHUN	4.476.000,00	4.476.000,00	100,00
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	TAHUN	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	JUMLAH				48.097.000,00	48.078.000,00	99,96

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Anggaran sebesar Rp. 6.470.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.460.000,00 atau sebesar 99,84%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan, seperti pertemuan lintas peta informasi masyarakat kurang gizi.

2. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Anggaran sebesar Rp.29.150.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.142.000,00 atau sebesar 99,97%. Realisasi lebih dari 90 % dan dana yang dialokasikan untuk perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas (PPG) kepada anak balita gizi kurang dan buruk dengan indikator BB/TB antara -2 SD dan -3 SD, dimana 278 anak status -2 SD dan 75 anak status -3 SD.

3. Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Anggaran sebesar Rp.4.476.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.476.000,00 atau sebesar 100,00%.

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.000.000,00 atau sebesar 100%. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan atau pencatatan pada semua kegiatan program perbaikan gizi masyarakat,

seperti monitoring PMBA (di puskesmas Sei Sarik, Ulakan, Sikabu) dan KP-ASI (di puskesmas Sikabu, Limau Purut, Sei Limau, Ulakan, Ampalu), pelaksanaan lomba balita, evaluasi data gizi, serta sosialisasi aplikasi e-ppgbm untuk petugas gizi.

J. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Anggaran sebesar Rp53.819.000 dan realisasi Rp52.522.000,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 97,59%, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Surveilans Kualitas Air	1	1	TAHUN	8.492.000,00	8.492.000,00	100,00
2	Replika Pamsimas	1	1	TAHUN	5.577.000,00	5.560.000,00	99,70
3	Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat	1	1	TAHUN	28.750.000,00	27.480.000,00	95,58
4	Nagari Bebas Jentik	1	1	TAHUN	11.000.000,00	10.990.000,00	99,91
	JUMLAH				635.270.000,00	633.299.317,00	98,15

1. Surveilans Kualitas Air

Anggaran Rp8.492.000,00 dan realisasi sebesar Rp 8.492.000,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh Kualitas Air Bersih yang baik dan untuk mengawasi air minum masyarakat dan depot air serta mensosialisasikan peraturan peraturan melalui petugas sanitasi puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman, realisasi fisik dan keuangan dari kegiatan ini dapat tercapai 100 %.

2. Replika Pamsimas

Anggaran Rp5.577.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.560.000,00 atau sebesar 99,70%. Kegiatan Replika Pamsimas bertujuan meningkatkan dampingan dari sanitarian puskesmas ke masyarakat untuk program sanitasi dan CTPS serta mengoptimalkan anggaran untuk pendampingan kegiatan Pamsimas. Realisasi fisik dari kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 99,70% .

3. Pengembangan Tananan Kabupaten Sehat

Anggaran Rp28.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp 27.480.000,00 atau sebesar 95,58%. Kegiatan Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat ini dimaksudkan untuk mewujudkan Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, pemerintah daerah dan swasta, mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, social, budaya serta perilaku pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil.

4. Nagari Bebas Jentik

Anggaran Rp11.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.990.000,00 atau sebesar 99,91%. Kegiatan ini telah dilakukan untuk sosialisasi, pertemuan, monitoring, evaluasi program studi ehra pada ibu rumah tangga disetiap nagari masing-masing 40 responden kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 99,91% karena efesiensi dalam penggunaan dana anggaran.

K. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Anggaran sebesar Rp152.489.200,00 dan realisasi Rp150.337.767,00. Kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,59%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Pelayanan pencegahan dan penangulangan penyakit menular	1	1	TAHUN	77.972.600,00	77.025.751,00	98,79
2	Peningkatan Imunisasi	1	1	TAHUN	47.458.000,00	46.564.866,00	98,12
3	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1	1	TAHUN	11.908.600,00	11.907.650,00	99,99
4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	1	TAHUN	15.150.000,00	14.839.500,00	97,95
	JUMLAH				152.489.200,00	150.337.767,00	98,59

1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Anggaran Rp. 77.972.000,00 dan realisasi Rp.77.025.751,00, atau sebesar 98,79%. Kegiatan ini telah dilakukan untuk pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV-AIDS, DBD-Malaria, Kusta, Diare, Infeksi saluran pernafasan akut (IsPa), Tuberkulosis (TB), Rabies. Kegiatan ini bertujuan menurunkan angka kesakitan, angka kematian TB dan memutuskan rantai penularan serta mencegah terjadinya MDR TB serta tercapainya keberhasilan pengobatan TB Paru BTA dan meningkatnya pengetahuan dan motivasi kerja dari komisi penanggulangan AIDS.

2. Peningkatan Imunisasi

Anggaran Rp.77.972.600,00 dan realisasi sebesar Rp.77.025.751,00 atau sebesar 98,79%. Kegiatan merupakan peningkatan imunisasi rutin dan BIAS lengkap pada bayi usia kurang 1 tahun dengan target 92,5% capaian 82,6%, tercapainya Korong UCI target 87% capaian 77,4% dan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio target 96% capaian 98,1% sedangkan sasarannya adalah Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio adalah anak usia kurang lima tahun, Imunisasi rutin bayi kurang 1 tahun dan Balita, Wanita Usia subur dan wanita hamil, sasaran ORI ke 3 adalah anak usia 0 bulan sampai usia 15 tahun.

3. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Anggaran Rp11.908.600,00 dan realisasi sebesar Rp.11.907.650,00 atau sebesar 99,99%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam manajemen kesehatan dengan indicator penemuan kasus lumpuh layuh akut (Accute Flaccid Paralyse/AFP) non polio ≥ 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun target 2/100.000 capaian 1,6/100.000, penemuan kasus discarded campak ≥ 2 per 100.000 penduduk target 2/100.000 caapaian 65,6/100.000, Investigasi dan Penanggulangan KLB target 100% capaian 100 %, Penguatan kewaspadaan dini KLB penyakit yang dapat ditanggulangi < 24 jam target 100% capaian 100%, Pengembangan system surveilans dan respon KLB target 25 Puskesmas capaian 100%, IT Surveilans dan respon KLB target 25 Puskesmas capaian 100%, Pengambilan dan pengiriman sampel kasus klinis campak target 60% capaian 30,4%, kelengkapan laporan system kewaspadaan dini dan respon (SKDR).

4. Pengendalian Penyakit Tidak menular

Anggaran Rp15.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.839.500,00, atau sebesar 97,95%.

Dengan kegiatan ini pengendalian dan pembinaan Posbindu PTM secara terpadu dan terdektesinya dini kanker leher Rahim dan payudara serta melakukan pemeriksaan pengemudi di terminal utama. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan target kinerja. Kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 97,95% karena efisiensi dalam penggunaan dana anggaran.

L. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp2.362.700.000,00 dan realisasi Rp2.213.680.039,00 atau sebesar 93,69%. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 93,69%, Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan	1	1	TAHUN	42.700.000,00	42.700.000,00	100,00
2	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1	1	TAHUN	2.320.000.000,00	2.170.980.039,00	93,69
	JUMLAH				2.362.700.000,00	2.213.680.039,00	86,25

1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Anggaran Rp 42.700.000,00 dan realisasi R.42.700.000,00. atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Pada kegiatan ini realisasi fisik dan keuangannya tercapai 100%.

2. Akreditasi Puskesmas (DAK non Fisik)

Anggaran Rp2.320.000.000,00 dan realisasi Rp2.170.980.039,00 atau sebesar

93,69%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan dengan pendampingan bagi puskesmas yang akan di Survey oleh Tim Surveyor.

M. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

Anggaran sebesar Rp6.222.082.000,00 dan realisasi Rp.5.767.115.432,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 92,69%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Pembangunan Puskesmas	1	1	TAHUN	118.000.000,00	117.865.000,00	99,89
2	Kegiatan Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	1	TAHUN	5.003.511.000,00	4.641.228.400,00	92,76
3	Administrasi Kegiatan DAK Sarana Puskesmas	1	1	TAHUN	290.000.000,00	276.812.500,00	95,45
4	Pembangunan Tempat Parkir Dinas Kesehatan	1	1	TAHUN	60.000.000,00	59.642.626,00	99,40
5	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) Penugasan	1	1	TAHUN	750.571.000,00	671.566.906,00	89,47
6	Pembangunan Polindes (Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2018)	1	1	TAHUN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH				6.222.082.000,00	5.767.115.432,00	92,69

1. Pembangunan Puskesmas

Anggaran Rp.118.000.000,00 dan realisasi Rp.117.865.000,00. atau sebesar 99,89%. Kegiatan ini telah terlaksana untuk pembuatan pagar puskesmas Sungai Limau.

2. Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Anggaran Rp 5.003.511.000,00 dan realisasi Rp4.641.228.400,00 atau sebesar 92,76% Kegiatan ini telah terlaksana untuk pengadaan peningkatan bangunan puskesmas sebanyak 2 (dua) paket yaitu Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Patamuan, Pengadaan IPAL sebanyak 2 (dua) Paket yaitu untuk Puskesmas Pauh

Kambar dan Puskesmas Pasar Usang, Pengadaan Ambulance 2 Unit yaitu untuk puskesmas Padang Sago dan Puskesmas Sintuk.

3. Administrasi Kegiatan DAK Sarana Puskesmas

Anggaran Rp290.000.000,00 dan realisasi Rp276.812.500,00 atau sebesar 95,45%. Kegiatan ini adalah merupakan pendukung dan penunjang operasional dalam pelaksanaan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

4. Pembangunan Tempat Parkir Dinas Kesehatan

Anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi Rp59.642.626,00 atau sebesar 99,40%. kegiatan merupakan pekerjaan 1 (satu) paket pembuatan tempat parkir Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) Penugasan

Anggaran Rp.750.571.000,00 dan realisasi Rp.671.566.906,00. atau sebesar 89,47%. Kegiatan ini telah terlaksana yaitu pengadaan kulkas vaksin dan vaksin carrie untuk puskesmas puskesmas.

N. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp4.712.484.600,00 dan realisasi Rp.3.889.070.650,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 82,53%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKS Sakato)	1	1	TAHUN	4.628.409.600,00	3.857.008.000,00	83,33
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	TAHUN	30.000.000,00	27.987.650,00	93,29
3	Jaminan pelayanan kesehatan Papa Tangkas Gada 119	1	1	TAHUN	54.075.000,00	4.075.000,00	7,54
	JUMLAH				4.712.484.600,00	3.889.070.650,00	82,53

1. Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKS Sakato)

Anggaran Rp. 4.628.409.600,00 dan realisasi Rp. 4.626.514.400,00 atau sebesar 83,33%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik karena kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran premi peserta PBI (JKSS) Kabupaten Padang Pariaman.

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran Rp30.000.000,00 dan realisasi Rp27.987.650,00 atau sebesar 93,29%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Jaminan Pelayanan Kesehatan Papa Tangkas Gada 119

Anggaran Rp54.075.000,00,00 dan realisasi Rp4.075.000,00 atau sebesar 7,54%. Kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena Program yang berkaitan dengan masyarakat yang mendapat pelayanan PSC 119 Papa Tangkas Gada mendapatkan jaminan pelayanan pengobatan di rumah sakit rujukan akan ditanggung biaya rumahnya sakit selama 24 jam pertama.

O. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dan realisasi Rp8.00.000,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 100,00%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	1	1	TAHUN	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	JUMLAH				8.000.000,00	8.000.000,00	100,00

1. Peningkatan pemeliharaan Kesehatan Lansia

Anggaran Rp8.000.000,00 dan realisasi Rp8.000.000,00. atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kepedulian dalam hal pengurusan, pemeliharaan terhadap kesehatan dan kemandirian para lansia di Kabupaten Padang Pariaman.

P. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Anggaran sebesar Rp 50.276.000,00 dan realisasi Rp 50.225.805,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,90%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1	1	TAHUN	17.000.000,00	16.975.000,00	99,85
2	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja	1	1	TAHUN	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	1	1	TAHUN	6.000.000,00	5.975.000,00	99,58
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	TAHUN	21.276.000,00	21.275.805,00	100,00
	JUMLAH				206.075.000,00	205.755.300,00	99,84

1. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

Anggaran Rp17.000.000,00 dan realisasi Rp16.975.000,00. atau sebesar 99,85%. Kegiatan ini telah dilaksanakan meliputi pertemuan ANC terpadu, P4K dan kelas ibu hamil, pertemuan audit medic KB untuk mengetahui penyebab kegagalan dan komplikasi dari program KB yang dilakukan pengkajiannya oleh SPOG dan SPB, evaluasi program Ibu pesertanya berjumlah 120 orang, serta untuk cetak buku KIA yang didistribusikan ke Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja

Anggaran Rp6.000.000,00 dan realisasi Rp6.000.000,00. atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini merupakan pertemuan dan nara sumbernya dari Kabupaten Padang Pariaman, monitoring kegiatan penjaringan ke Puskesmas dan sekolah serta cetak blanko kuesioner, sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola program UKS, pengelola program gizi masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan sasaran murid baru kelas 1 SD/MI, SMP.MTS dan SMA/SMK/MA, Pesantren, SLB dan lapas anak baik negeri maupun swasta.

3. Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan Tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Anggaran Rp6.000.000,00 dan realisasi Rp5.975.000,00. atau sebesar 99,58%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang program kesehatan peduli remaja (PKPR) dan merupakan sosialisasi dan pendekatan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengkaderkan siswa menjadi konselor sebaya, bias dibentuk di sekolah – sekolah dengan kerjasama dari puskesmas.

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Anggaran Rp21.276.000,00 dan realisasi Rp21.275.805,00. atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang dilakukan pengkajian oleh dokter specialist kebidanan, Anak, IDI, IBI, Karu Kebidanan RS, Kabid Yanmed RS berjumlah 15 orang. Pembelajaran kasus dengan peserta bidan puskesmas dan bidan desa sebagai ujung tombak dilapangan yang berjumlah 50 orang peserta, kegiatan evaluasi kinerja bikor dilaksanakan 4 kali dihadiri oleh Bikor Puskesmas berjumlah 100 orang, serta sosialisasi sufas KIA 4 kali berdasarkan regional puskesmas dengan dokter spesialis kebidanan & anak.

Q. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan operasional 25 puskesmas, 1 instansi farmasi kabupaten dan 1 laboratorium kesehatan daerah sekabupaten padang pariaman tahun anggaran 2018 untuk menunjang kinerja UPTD tersebut. Dari anggaran Rp. 2.626.500.000,00 terealisasi Rp. 2.585.529.204,00 atau sebesar 98,44 %. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	100,000,000,00	99,712,969,00	99.00
2	Batu Basa	1	1	Tahun	99,000,00,000	96.601.230,00	97.00
3	Gasan Gadang	1	1	Tahun	103,000,000,00	102,316,78,009	99.34
4	Ketaping	1	1	Tahun	95,000,000,00	94,472,696,00	99.44
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	107,000,000,00	106,899,252,00	99.91
6	Kampung Guci	1	1	Tahun	100,000,000,00	99,335,750,00	99.34
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	100,000,000,00	99,528,150,00	99.53
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	112,000,000,00	110,669,178,00	98.81
9	Limau Purut	1	1	Tahun	90,000,000,00	88,606,600,00	98.45
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	107,000,000,00	104,978,650,00	98.11
11	Padang Alai	1	1	Tahun	116,000,000,00	113,649,13,00	97.97
12	Padang Sago	1	1	Tahun	108,000,000,00	103,948,354,00	96.25
13	Pakandangan	1	1	Tahun	98,000,000,00	97,173,579,00	99.16
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	107,000,000,00	106,572,592,00	99.60
15	Patamuan	1	1	Tahun	90,000,000,00	88,670.52,00	98.52
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	115,000,000,00	114,777,964,00	99.81
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	115,000,000,00	112,994,450,00	98.26
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	107,000,000,00	104,132,938,00	97.32
19	Sicincin	1	1	Tahun	142,000,000,00	140,687,375,00	99.08
20	Sikabu	1	1	Tahun	108,000,000,00	107,736,949,00	99.76
21	Sintuk	1	1	Tahun	98,000,000,00	97,954,850,00	99.95
22	Ulakan	1	1	Tahun	103,000,000,00	102,364,047,00	99.38
23	Pauh Kambar	1	1	Tahun	107,000,000,00	105,816,327,00	98.89
24	Ampalu	1	1	Tahun	108,000,000,00	103,642,760,00	95.97
25	IFK	1	1	Tahun	275,000,000,00	272,819,787,00	99.21
26	Sikucur	1	1	Tahun	90.000.000,00	89.797.335,00	99.97
27	Labkesda	1	1	Tahun	95.000.000,00	77.854.600,00	81,95
	Jumlah				2,626,500,000	2,585,529,204	98.44

R. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh di 25 Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018, dari anggaran belanja yang ada di DPA sebesar Rp15.007.180.617,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp13.468.677.014,00 atau sebesar 89,00%. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	273,426,440,00	244,304,134,00	89,00
2	Batu Basa	1	1	Tahun	785,000,000,00	836,498,418,00	106,00
3	Gasam Gadang	1	1	Tahun	523,000,000,00	237,032,482,00	45,00
4	Ketaping	1	1	Tahun	568,256,000,00	331,070,621,00	58,00
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	475,000,000,00	488,022,720,00	102,00
6	Kampung Guci	1	1	Tahun	255,000,000,00	225,869,449,00	88,00
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	294,000,000,00	282,997,375,00	96,00
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	500,000,000,00	457,962,795,00	91,00
9	Limau Purut	1	1	Tahun	349,145,287,00	286,649,232,00	82,00
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	954,500,000,00	1,160,647,844,00	121,00
11	Padang Alai	1	1	Tahun	170,000,000,00	147,626,250,00	86,00
12	Padang Sago	1	1	Tahun	460,000,000,00	250,793,850,00	54,00
13	Pakandangan	1	1	Tahun	607,000,000,00	749,759,816,00	123,00
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	844,044,750,00	643,706,256,00	76,00
15	Patamuan	1	1	Tahun	742,207,850,00	660,651,518,00	89,00
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	610,000,000,00	592,826,564,00	97,00
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	1,470,000,000,00	1,393,766,153,00	94,00
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	870,420,040,00	721,397,790,00	82,00
19	Sicincin	1	1	Tahun	350,000,000,00	320,382,362,00	91,00
20	Sikabu	1	1	Tahun	286,792,000,00	227,618,904,00	79,00
21	Sintuk	1	1	Tahun	882,050,000,00	877,069,662,00	99,00
22	Ulakan	1	1	Tahun	761,382,750,00	729,067,150,00	95,00
23	Pauh Kambar	1	1	Tahun	1,113,660,800,00	1,112,817,169,00	99,00
24	Ampalu	1	1	Tahun	569,000,000,00	319,808,500,00	56,00

25	Sikucur	1	1	Tahun	293,294,700,00	170,330,000,00	58,00
Jumlah					16.007.180.617,00	13.468677014,00-	89,00-

2. Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 25 Puskesmas, 1 Instansi Farmasi Kabupaten di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018. Dari anggaran Rp13.690.463.000,00 terealisasi sebesar Rp11.881.541.037,00,00 atau sebesar 86,00%. Adapun rincian puskesmas sebagai berikut :

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	580.000.000,00	488,514,150,00	8,00
2	Batu Basa	1	1	Tahun	750.000.000,00	587,107,500,00	78.28
3	Gasam Gadang	1	1	Tahun	500.000.000,00	396,178,400,00	79.24
4	Ketaping	1	1	Tahun	460.000.000,00	459,980,100,00	100.00
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	431,962,000,00	332,188,400,00	76.90
6	Kampung Guci	1	1	Tahun	325.000.000,00	301,417,400,00	92.74
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	450.000.000,00	372,716,000,00	82.83
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	450.000.000,00	394,312,537,00	87.63
9	Limau Purut	1	1	Tahun	380.000.000,00	312,906,500,00	82.34
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	800.000.000,00	704,143,500,00	88.02
11	Padang Alai	1	1	Tahun	350.000.000,00	304,621,000,00	87.03
12	Padang Sago	1	1	Tahun	360.000.000,00	286,581,800,00	79,01
13	Pakandangan	1	1	Tahun	630.000.000,00	524,824,300,00	83,31
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	850.000.000,00	665,765,980,00	78,33
15	Patamuan	1	1	Tahun	550.000.000,00	441,327,000,00	80,24
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	480.000.000,00	479,987,900,00	100.00
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	830.000.000,00	760,135,000,00	91,58
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	650.000.000,00	627,908,000,00	96.60
19	Sicincin	1	1	Tahun	470.000.000,00	470,000,000,00	100.00
20	Sikabu	1	1	Tahun	350.000.000,00	308,207,500,00	88.06
21	Sintuk	1	1	Tahun	570.000.000,00	555,152,500,00	97,40
22	Ulakan	1	1	Tahun	600.000.000,00	435,376,800,00	72,56
23	Pauh Kambar	1	1	Tahun	730.000.000,00	690,180,700,00	94,55

24	Ampalu	1	1	Tahun	470,000,000,00	421,512,900,00	89,68
25	IFK	1	1	Tahun	73,501,000,00	66,069,570,00	89,89
26	Sikucur	1	1	Tahun	600,000,000,00	494,425,600,00	82,40
Jumlah					13,690,463,000,00	11,881,541,037	86,00

3. Terlaksananya Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk 25 Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018. Dari anggaran Rp3.466.435.000,00 terealisasi sebesar Rp544.540.540,00 atau sebesar 15,71%. Hal ini disebabkan karena pencairan untuk rumah tunggu tidak bisa di realisasikan karena akses jalan menuju Rumah Sakit lancar dan banyak pasien yang langsung menuju Rumah Sakit untuk bersalin bukan ke pustu/puskesmas serta juknis terkait pelaksanaan jaminan persalinan (jampersal) belum bisa dimengerti sepenuhnya oleh puskesmas dalam hal mekanisme pencairan dana tersebut.

4.Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan dan realisasi APBD dapat dilihat secara terperinci.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun system musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lebih optimal.

Melihat kondisi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD yang

dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis di bidang kesehatan mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan (lampiran 2) melalui :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam pasal 28 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ***Kesehatan Masyarakat meliputi Usaha Preventif, Kuratif, Promotif, Rehabilitatif, dan melaksanakan ketata usahaan dinas secara horizontal dan vertikal.***

Berdasarkan Perda No. 50 Tahun 2016, struktur organisasi dan pejabat dari Dinas Kesehatan pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 Bidang Teknis Program Kesehatan yaitu Bidang Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Kesehatan Keluarga dan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

❖ **Kepala Dinas**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- b. Perumusan kebijakan umum bidang kesehatan;
- c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. Koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
- i. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretaris**

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, informasi dan hubungan masyarakat pada Dinas;

- g. Koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
- h. Pengelolaan urusan ASN;
- i. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/ atau
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi atas 3 Subbagian :

- 1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
- 2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
- 3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

❖ Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi program, informasi dan hubungan masyarakat kesehatan dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan

lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dan asset Dinas;
- b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dan asset Dinas;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset Dinas;
- e. Pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Luar Negeri); dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi,

mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

- c. Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan (Perda, Perbup);
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- g. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) pada Dinas;
- h. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
- i. Penyiapan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j. Pelaksanaan administrasi, kearsipan dan perpustakaan; dan/ atau
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi

- masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan/atau
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat dibagi atas 3 Seksi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

❖ Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;

- e. Pembinaan kelompok lanjut usia;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat.

untuk menyelenggarakan tugas seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi promosi dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS);
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pecegahan dan Pegendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi,

- pengecahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan atau
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibagi atas 3 Seksi :

- 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
- 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular

❖ Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi surveilans dan imunisasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi surveilans dan imunisasi;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi surveilans dan imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB);
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dibidang seksi survailans dan immunisasi;

- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi survailans dan immunisasi dan kejadian luar biasa (KLB); dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa** mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer

- dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Penyelenggaraan koordinasi bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan primer;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan primer;
- d. Memberikan rekomendasi registrasi puskesmas baru;
- e. Fasilitasi dan pembinaan proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan primer;

- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan tradisional mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Memberikan rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional (UKOT);

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, bidang sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Memberikan rekomendasi perizinan PBF, PAK dan PKRT;
- f. Menyelenggarakan pengawasan industri rumah tangga (PIRT); dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Kefarmasian**

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi kefarmasian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kefarmasian;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kefarmasian;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kefarmasian;
- d. Memberikan rekomendasi izin rumah obat, apotik;
- e. Melaksanakan pengawasan obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kefarmasian;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

➤ Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan PKRT.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi alat kesehatan dan PKRT mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi alat kesehatan dan PKRT;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang seksi alat kesehatan dan PKRT;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi alat kesehatan dan PKRT;
- d. memberikan rekomendasi izin penyalur alat kesehatan;
- e. melaksanakan pengelolaan data alat kesehatan dan PKRT;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi alat kesehatan dan PKRT;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi alat kesehatan dan PKRT; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

➤ Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang seksi sumber daya manusia kesehatan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi sumber daya manusia kesehatan;
- d. memberikan rekomendasi rumah sakit pendidikan;
- e. melaksanakan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan; dan atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjurangan lainnya.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

No	Golongan	Jumlah Pegawai
	Golongan IV d	0
2	Golongan IV c	1
3	Golongan IV b	9
4	Golongan IV a	25
5	Golongan III d	168
6	Golongan III c	88
7	Golongan III b	124
8	Golongan III a	141
9	Golongan II d	54
10	Golongan II c	248
11	Golongan II b	52
12	Golongan II a	22
13	Golongan I d	2
14	Golongan I c	5
15	Golongan I b	2
16	Golongan I a	1
	Jumlah	951

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering:

No.	Eselon	Jumlah (orang)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	4
4	IV/a	17
5	IV/b	2
Total		25

Tabel I.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Jenis Pendidikan	
	Uraian	Jumlah
1	S2 (Magister)	
	- S2 Kesehatan Masyarakat	10
	- Keperawatan	1
	- Mars	1
	- S2 Non Kesehatan	4
	Jumlah S2 (Magister)	16
2	S1 (Sarjana)	
	- Dokter Umum	28
	- Dokter Gigi	16
	- Apoteker	4
	- Sarjana Kesehatan Masyarakat	36
	- Sarjana Keperawatan	47
	- Sarjana Keperawatan Gigi	1
	- Sarjana Gizi	3
	- Sarjana Non Kesehatan	8
	Jumlah S1 (Sarjana)	143
3	Diploma IV	
	- Diploma IV Kebidanan	59
	- Diploma IV Analisis	3
	- Diploma Keperawatan Gigi	1
	- Diploma IV Kesling	6
	Jumlah Diploma IV	69
3	Diploma III	
	- D3 – Kebidanan	356
	- D3 – Keperawatan	130
	- D3 – Keperawatan gigi	21
	- D3 – Kesehatan Lingkungan	12

No	Jenis Pendidikan	
	Uraian	Jumlah
	- D3 – Analisis Kesehatan	17
	- D3 – Gizi	13
	- D3 – Tekniker Gigi	1
	- D3 – Farmasi	16
	- D3 – Rekam Medik	2
	- Non Kesehatan	3
	Jumlah Diploma III	571
4	Diploma I/SLTA/Sederajat	
	- SPB	30
	- SPB (Gol. II.a)	21
	- SPPH	2
	- SPAG	1
	- SPK	13
	- SPK (Gol II.a)	33
	- SMF	5
	- SPRG	2
	- SLTA Lain	35
	Jumlah Diploma I/SLTA/Sederajat	142
	Jumlah SLTP	5
	Jumlah SD	5
	Jumlah	951

Walaupun belum ada penelitian yang membuktikan signifikannya pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kinerja sumber daya manusia, namun secara paralel, tingkat pendidikan yang didukung dengan pengalaman kerja yang tinggi pada suatu instansi, akan mempengaruhi tingkat keterampilan dan kreatifitas kerjanya.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada lampiran kesatu, digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dimana dijelaskan komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
2. Struktur organisasi kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan terutama pada subag Perencanaan dan Evapor dibandingkan dengan subag Perencanaan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lainnya yang hanya melaksanakan penyusunan program, sedangkan Subag Perencanaan dan Evapor melaksanakan penyusunan program dan evaluasi program.
3. Adanya keterlambatan regulasi baik tingkat pusat maupun propinsi maupun tingkat Kabupaten sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang sudah ditetapkan harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.
4. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan barang/Jasa masih sedikit
5. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di Dinas Kesehatan untuk menunjang proses perencanaan
6. Belum adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk mengutamakan hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan
7. Hasil musrenbang masih didominasi oleh pembangunan fisik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana

Kerja SKPD (Renja SKPD), SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2018 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN tahun 2005-2025, 2) RPJMN tahun 2014-2019, 3) RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2005-2015, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 20015-2025, 5) RPJMD tahun 2016-2020, Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2020. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja SKPD yang dilaksanakan masing-masing SKPD (Lampiran 3).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2019 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra Dinas Kesehatan) tahun 2016-2020, Renja Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2016 – 2020, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2016-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui : (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Indonesia Yang Mandiri, Maju, adil dan Makmur</i>		<i>Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2016-2020 dengan Visi Misi Padang Pariaman Tahun 2015-2020

VISI RPJMN TAHUN 2014-2019		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
MISI RPJMN TAHUN 2014-2019		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 2016-2020 yakni Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam,

kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Melalui rencana strategis ini memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu periode tahun 2016-2020, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kotadan dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman terpilih periode 2016-2020.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 karena tahun 2020 merupakan tahun kedua dari periode ketiga pelaksanaan RPJMD (Tahun 2015-2020) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2015. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2020 maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi petanian serta peningkatan kapasitas penyuluh
2. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah* dengan arah kebijakan melalui mengembangkan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.
4. *Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha* serta

pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.

5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi* dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. *Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi* dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar SKPD.
8. *Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana* dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam
9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan

pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Dinas Kesehatan tahun 2019 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan IPTEK* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	SasaranStrategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya status kesehatan dan status gizi individu, keluarga dan masyarakat	1. Angka kematian Bayi (IKU)
			2. Angka kematian ibu (IKU)
			3. Persentase balita gizi buruk
			4. Usia harapan hidup (IKU)
		2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Persentase sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terakreditasi (IKU)
			2. Persentase pelayanan kesehatan rujukan call center 119 yang ditangani
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	1. Persentase pencapaian penyakit menular yang ditangani
			2. Cakupan Desa/ Kelurahan/Korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
			3. Cakupan Desa/kelurahan/Korong Universal Child Immunization (UCI)
		4. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	1. Persentase cakupan Jaminan Kesehatan keluarga miskin (GAKIN)
			2. Persentase cakupan Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat
		5. Meningkatkan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	1. Cakupan Desa/Nagari Siaga Aktif Mandiri
			2. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
		6. Meningkatkan sumber	1. Persentase ketersediaan obat dan

No	Tujuan	SasaranStrategis	Indikator Kinerja
		daya kesehatan	vaksin di Puskesmas 2. Persentase Jumlah Tata Ruang Bangunan Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar ruang 3. Rata-rata persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar alat kesehatan. 4. Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis nakes
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kesehatan	1. Nilai akuntabilitas kinerja B
1.	Memantapkan dukungan manajemen dan tata kelola administrasi kesehatan yang dinamis dan akuntabel	1. Meningkatnya ketersediaan data kesehatan secara cepat, akurat dan tepat melalui pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	1. Jml Puskesmas yang mengembangkan Sistim Informasi Kesehatan terintegrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
- 2) Peningkatan status kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, anak, lansia dan gizi
- 3) Peningkatan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 4) Peningkatan upaya pelayanan dan pemulihan kesehatan masyarakat
- 5) Peningkatan upaya pelayanan dan pemulihan kesehatan bagi keluarga miskin

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2017Dinas Kesehatan menyelenggarakan 7

(tujuh) Urusan Wajib, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Statistik, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat, yang secara keseluruhan meliputi 19 program dan 68 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 37.599.184.000,-.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 berikut:

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang , Juli 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Drs. Yutiardy Rivai, Apt
NIP 19630905 199003 1001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

URUSAN : WAJIB (PELAYANAN DASAR) PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

OPD : DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA				110,141,913,72	1			124,388,079,52	1

	BELANJA TIDAK LANGSUNG					48,915,034,521			48,915,034,521
	BELANJA LANGSUNG					61,226,879,200			75,473,045,000
....									
1.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Dinas Kesehatan			5,082,000,000			6,540,000,000
1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan ATK, materai, penggandaan dan cetak dokumen juknis kerja	Dinas Kesehatan	12 bulan		60,000,000	APBD	12 bulan	100,000,000

1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perkantoran (alat alat listrik, listrik dan internet)	Dinas Kesehatan	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	180,000,000	
1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk honorarium PA, KPA, Bendahara, PPTK	Dinas Kesehatan	12 bulan	914,000,000	APBD		12 bulan	775,000,000	
1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	104,000,000	APBD		12 bulan	150,000,000	
1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	12 bulan	10,000,000	APBD		12 bulan	10,000,000	
1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu	Dinas Kesehatan	12 bulan	26,000,000	APBD		12 bulan	60,000,000	

1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Kesehatan	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	200,000,000	
1.02.01.01.20	Penyediaan jasa tenaga shift Puskesmas Rawatan	Tersedianya jasa tenaga shift Puskesmas rawatan	Puskesmas	12 bulan	600,000,000	APBD		12 bulan	720,000,000	
1.02.01.01.21	Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan	12 bulan	168,000,000	APBD		12 bulan	95,000,000	
1.02.01.16.XX	Operasional Puskesmas	Tersedianya dana untuk Operasional Puskesmas	Puskesmas	12 bulan	2,200,000,000	APBD		12 bulan	3,500,000,000	
1.02.01.16.XX	Operasional Instalasi Farmasi	Tersedianya dana untuk Operasional Instalasi Farmasi	Instalasi Farmasi	12 bulan	350,000,000	APBD		12 bulan	350,000,000	

1.02.01.16.XX	Operasional Labkesda	Tersedianya dana untuk Operasional Labkesda	Labkesda	12 bulan	350,000,000	APBD		12 bulan	400,000,000	
1.02.01.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan	Dinas Kesehatan		425,000,000				890,000,000	
1.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk promosi kesehatan dan penanganan fogging	Dinas Kesehatan	2 Mobil	-	APBD		1 Mobil	250,000,000	
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	5 laptop, 5 Printer, 5 UPS, 2 infocus	50,000,000	APBD		Komputer 5 dan Printer 5	80,000,000	

1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair gedung kantor	Dinas Kesehatan	5 Lemari, 20 Meja dan 50 Kursi	50,000,000	APBD		2 Lemari, 10 Meja dan 20 Kursi	100,000,000	
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya peralatan yang ada di gedung kantor	Dinas Kesehatan	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	100,000,000	
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang ada dikantor	Dinas Kesehatan	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	180,000,000	
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan yang ada di gedung kantor	Dinas Kesehatan	12 bulan	25,000,000	APBD		12 bulan	50,000,000	
1.02.01.02.44	Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas	Dinas Kesehatan	8 Mobil	50,000,000	APBD		3 Mobil	30,000,000	

1.02.01.02.46	Pengelolaan, pengawasan dan pengelolaan, pengendalian asset	Terlaksananya dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset	Dinas Kesehatan	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	100,000,000	
....										
1.02.01.05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya			250,000,000				675,000,000	
1.02.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Terlaksananya pertemuan sosialisasi peraturan perundang	Dinas Kesehatan	250 orang	25,000,000	APBD		250 orang	50,000,000	
		Naskah akademis Ranperda	Dinas Kesehatan							

1.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya dana untuk bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kementerian dan pemerintah pusat	Dinas Kesehatan	15 orang	50,000,000	APBD		10 orang	100,000,000	
1.02.01.05.04	Penataan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pertemuan penataan kepegawaian untuk Dinas Kesehatan/ Puskesmas	Dinas Kesehatan	50 orang	50,000,000	APBD		50 orang	100,000,000	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pegawai di Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		

1.02.01.06.10	Peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas secara teknis	Dinas Kesehatan	1 paket	50,000,000			28 sarana	250,000,000	
1.02.01.06.08	Perencanaan Daya Kesehatan Penyusunan Daya Kesehatan	Sumber Manusia dan Sumber Manusia	Terdokumennya data jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan Permenkes 33 tahun 2015	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	40,000,000		28 sarana	100,000,000	
1.02.01.06.09	Pengawasan Daya Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan	Sumber Manusia dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jml tenaga kes di fasyankes pemerintah dan swasta yang mempunyai SIP	Dinas Kesehatan	25 Pusk	35,000,000		1 perbup	75,000,000	

		Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi Izin Operasional	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	
....									
1.02.01.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Outcome : Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan			270,077,200				325,000,000
		Tersusunnya perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan							

		Tersusunnya rancangan dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kesehatan							
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan	Dinas Kesehatan	8 Dokumen	70,000,000	APBD		8 Dokumen	75,000,000
1.02.01.06.06	Perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya pertemuan rencana usulan kegiatan Puskesmas dari berbagai sumber anggaran	Dinas Kesehatan	75 orang	100,077,200	APBD		75 orang	100,000,000

		Terlaksananya pertemuan rencana pelaksanaan kegiatan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas dari berbagai sumber anggaran	Dinas Kesehatan	75 orang				75 orang	
1.02.01.06.07	Verifikasi dan rekonsiliasi keuangan	Tersusunnya pengawasan dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	25 Pusk	100,000,000	APBD		25 Pusk	150,000,000

1.02.01.15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Outcome : Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan			3,922,842,000				4,017,842,000
1.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pemusnahan obat yang kadaluarsa dan rusak	Dinas Kesehatan	25 Pusk	75,000,000	APBD		25 Pusk	50,000,000
1.02.01.15.07	Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas	Terlaksananya workshop pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas.	Dinas Kesehatan	2 kali	50,000,000	APBD		2 kali	80,000,000
		Terlaksananya rapat evaluasi pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas.	Dinas Kesehatan	1 kali				1 kali	

		Supervisi dan pengawasan pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas.	Puskesmas	25 Pusk				25 Pusk	
1.02.01.15.08	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk	3,537,842,000	DAK		25 Pusk	3,537,842,000
1.02.01.15.10	Administrasi Kegiatan DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya biaya administrasi dan operasional dalam rangka pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	50,000,000
1.02.01.15.XX	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk	150,000,000	APBD		25 Pusk	200,000,000

1.02.01.15.XX	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya workshop standar pelayanan kefarmasian	Dinas Kesehatan	2 kali	50,000,000	APBD		2 kali	100,000,000	
		Terlaksananya rapat evaluasi pelayanan kefarmasian di puskesmas.	Dinas Kesehatan	1 kal				1 kal		
		Supervisi dan pengawasan pelayanan kefarmasian di puskesmas.	Puskesmas	25 Pusk				25 Pusk		
1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat			36,666,960,000				35,992,269,500	

		Outcome : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas							
		Outcome : Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga							
1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya indikator kepuasan masyarakat (IKM) untuk Puskesmas se Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehatan	25 Pusk	35,000,000	APBD		60 orang	100,000,000
		Terlaksananya mobile terpadu berbasis informasi teknologi (perangkat promkes)	Dinas Kesehatan	25 Pusk	35,000,000	APBD			100,000,000

		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk	35,000,000	APBD			260,000,000	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan haji, gigi dan mulut.			40,000,000					
1.02.01.16.23	Peningkatan pelayanan kesehatan bencana	Terbentuknya tim bencana disetiap Puskesmas siaga bencana	Dinas Kesehatan	25 Pusk	26,000,000	APBD		60 orang	80,000,000	
		Terampilnya tenaga tim siaga bencana dalam memberikan pelayanan korban bencana						60 orang		
		Tersusunnya rencana konsolidasi bencana yang tergabung dalam								

		BPBD							
1.02.01.16.25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Terlaksananya upaya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Puskesmas	25 Pusk dan IFK	18,287,000,000	DAK Non Fisk		25 Pusk dan IFK	14,514,849,000
1.02.01.16.26	Jaminan Persalinan	Tersedianya rumah tunggu untuk persalinan diwilayah Kab. Padang Pariaman	Puskesmas	25 Pusk	1,549,000,000	DAK Non Fisk		25 Pusk	3,466,435,000
1.02.01.16.xx	DAK Non Fisik Sekunder	Terlaksananya kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	25 Pusk	1,287,000,000	DAK Non Fisk		25 Pusk	
1.02.01.16.xx	DAK Non Fisik Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi DAK Non	Dinas Kesehatan	25 Pusk	1,030,000,000	DAK Non Fisk			

		Fisik di Dinas Kesehatan							
1.02.01.16.XX	BOK Distribusi Obat dan E Logistik	Terlaksananya pendistribusian obat	IFK		84,760,000	DAK Non Fisik			
1.02.01.16.29	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tenaga Kesehatan	Terpilihnya Puskesmas dan tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	25 Pusk	40,000,000	APBD		25 Pusk	60,000,000
1.02.01.16.32	Peningkatan kapasitas petugas pengelola rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan		20,000,000				160,000,000

		Terlaksananya pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya							
1.02.01.16.33	Peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis dan supervisi rumah sakit tindak lanjut ditingkat rumah sakit	Tercapainya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Dinas Kesehatan		35,000,000				130,000,000
1.02.01.16.35	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya kegiatan Kesehatan Kerja dan kesehatan Olah raga	Dinas Kesehatan	Dinkes dan Pusk	25,000,000	APBD		25 Pusk	80,000,000
1.02.01.16.36	Peningkatan Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Tercapainya cakupan puskesmas bebas pasung	Dinas Kesehatan	100%	35,000,000	APBD		3 sekolah	46,300,000

		Terlaksananya Workhsop tentang kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	115 org				25 orang		
		Terlaksananya Workhsop pengaruh narkoba terhadap kesehatan	Dinas Kesehatan	115 org				25 Pusk		
		Terlaksananya supervisi dan bimbingan teknis program PTM	Dinas Kesehatan	25 pusk				2 Pusk		
		Pemeriksaan Narkoba terhadap pejabat di lingkungan Pemda	Dinas Kesehatan	200 org				25 Pusk		
		Tersedianya ATK dan Sarana Pendukung untuk Pelaksanaan program pencegahan penyakit tidak	Dinas Kesehatan	12 Bln						

		menular								
1.02.01.16.41	Pencegahan Gangguan Indera Fungsional	Tercapainya cakupan masyarakat yang Operasi Katarak	Dinas Kesehatan	50%	20,000,000	APBD		50 mata	64,250,000	
		Terlaksananya workshp mengenai gangguan indera fungsional	Dinas Kesehatan					100 orang		
		Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat tidak mampu	Dinas Kesehatan	50 org	20,000,000			75 orang		
		Terlaksananya workshp peningkatan kapasitas SDM pemegang program	Dinas Kesehatan	75 org				5 sekolah		

		Mata								
1.02.01.16.42	Pengawasan kesehatan dan PKRT	Alat Terlaksananya Pengelolaan ASPAK di Puskesmas secara maksimal dan alat kesehatan terinventaris dan terdokumentasi dengan baik dan benar	Dinas Kesehatan	93%	50,000,000	APBD		25 Pusk	200,000,000	
		Tercapainya standar alat kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	80%						
		Terlaksananya Kalibarsi Alat Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	80%						

		Terlaksananya pengawasan PKRT	Dinas Kesehatan	100%						
		Tercapainya dokumen perizinan untuk PKRT	Dinas Kesehatan	100%						
		Tercapainya pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas dengan baik	Dinas Kesehatan	100%						
		Terlaksanya Supervisi dan Bimbingan Teknis terhadap penatalaksanaan Alkes di puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk						
		Terlaksananya Petemuan tentang penggunaan dan pengoperasian	Dinas Kesehatan	120 org						

		Aplikasi ASPAK								
		Terlaksananya Pertemuan Evaluasi pengelolaan alkes di puskesmas	Dinas Kesehatan	35 org						
		Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Alkes dan PKRT serta Kalibrasi Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas	Dinas Kesehatan	15 org						
		Terlaksana Monev terhadap penatalaksanaan pengawasan PKRT	Dinas Kesehatan	25 Pusk						

1.02.01.16.43	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Puskesmas	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program kegiatan per regional di Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk	50,000,000	APBD		25 Pusk	150,000,000	
1.02.01.16.44	Pelayanan Kesehatan Papa Tangkas Gada 119	Terlaksananya pertemuan Papa Tangkas Gada 119	Dinas Kesehatan	25 Pusk	750,000,000	APBD		25 Pusk	1,500,000,000	
		Tersedianya sistem komunikasi, alat kesehatan dan GPS disetiap Puskel PSC Papa Tangkas Gada di tiap tiap Puskesmas	Dinas Kesehatan							
		Tersedianya alat kesehatan (emergency kit) di Puskel PSC papa Tangkas Gada 119	Dinas Kesehatan							

		Terlaksananya operasional Papa Tangkas Gada 19	Dinas Kesehatan	12 bulan				12 bulan		
		Tersedianya penambahan dan perpanjangan aplikasi PSC Papa Tangkas Gada 119	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		
1.02.01.16.XX	Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk JKN (Dana Kapitasi)	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN	Puskesmas	25 Pusk	12,000,000,000	JKN	BLUD	25 Pusk	13,852,235,500	
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk JKN (Dana Non Kapitasi)	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN	Puskesmas	25 Pusk	1,178,200,000	JKN	BLUD	25 Pusk	1,178,200,000	
1.02.1.02.01XX	Pelayanan Keluarga Sehat	Terlaksananya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga	Dinas Kesehatan	25 Pusk	35,000,000				50,000,000	

		Terlaksananya monitoring dan evaluasi PIS PK							
	5 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Outcome : Meningkatnya kualitas lingkungan tempat pengolahan pangan			70,000,000	APBD			125,000,000
		Outcome : Meningkatnya pelayanan kefarmasiaan di sarana pelayanan kesehatan							
1.02.01.17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan	Terlaksananya pertemuan penyuluhan Cara Produksi Pangan	Dinas Kesehatan	1 x Pertemuan	35,000,000	APBD		1 x Pertemuan	125,000,000

	makanan	Yang Baik							
		Terlaksananya sosialisasi pemilihan Pangan yang Baik	Dinas Kesehatan	2 Pertemuan				2 Pertemuan	
		Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi PIRT	Dinas Kesehatan	15 kali survey				15 kali survey	
1.02.01.17.03	Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengawasan Toko Obat dan Apotek, Mini Market, Toko Kosmetik, Salon, Barber Shop, Fitness	Dinas Kesehatan	1 Perbup	35,000,000	APBD		1 Perbup	100,000,000

		Melakukan pengawasan apotek		15 Apotek				15 Apotek	
		Melakukan Pengawasan Toko Obat		15 Toko Obat				15 Toko Obat	
		Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi toko obat dan apotek		15 kali survey				15 kali survey	
1.02.01.19.	Program Kesehatan Pemberdayaan masyarakat	Promosi dan Outcome : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat		75%	240,000,000	APBD		75%	1,859,187,500
		Outcome : Meningkatnya pemberdayaan		60%				60%	

		masyarakat							
		Outcome : Meningkatnya sistem informasi kesehatan dengan pendekatan keluarga		50%				50%	
1.02.01.19.06	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di Puskesmas, Bides, Toma dan Kader	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan	50 orang	35,000,000	APBD		50 orang	75,000,000
1.02.01.19.07	Pengembangan dan peningkatan pelayanan sistem informasi kesehatan	Terlaksananya sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	25 orang	50,000,000	APBD		25 orang	100,000,000

		Tersedianya profil Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	
1.02.01.19.09	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya media promosi dan sosialisasi tentang sandar hidup sehat (leaflet, CD, spanduk dll)	Dinas Kesehatan	7 paket leaflet, spanduk 100 bh), 2 paket baliho, 100 bh banner, CD Promosi	35,000,000	APBD		7 paket leaflet, spanduk 100 bh), 2 paket baliho, 100 bh banner, CD Promosi	366,187,500
		Terlaksananya pembinaan PHBS, regional Puskesmas, nagari siaga, KSI, tenaga penyuluh	Dinas Kesehatan	189 orang				189 orang	

		Terlaksananya survey PHBS dan meningkatnya jumlah rumah tangga dan korong PHBS	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya pertemuan dengan petugas Promkes	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya talkshow di radio dan iklan spot tentang Promosi Kesehatan (TV dan radio)	Dinas Kesehatan	2 stasiun radio dan 1 TV				2 stasiun radio dan 1 TV		
1.02.01.19.10	Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional	Terlaksananya pertemuan pengelola kesehatan tradisional, komplementer dan wilayah kerja Puskesmas	Dinas Kesehatan	100 orang	35,000,000	APBD		100 orang	181,000,000	

1.02.01.19.11	Peningatan Kesehatan Masyarakat Berbasis Usaha	Terlaksananya program akupressur pada pada kelompok asuhan mandiri	Dinas Kesehatan	50 orang	35,000,000	APBD		50 orang	181,000,000	
		Workshop pelayanan kesehatan tradisional akupresure	Dinas Kesehatan	25 Pusk					190,500,000	
		Terlaksananya pertemuan asuhan mandiri kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	25 Pusk					185,500,000	
1.02.1.02.01.12	Pembinaan Pengembangan TOGA dalam penggunaan obat tradisional	Terlaksananya lomba pemamfaatan TOGA dan akupresure di tingkat Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk	25,000,000			25 Pusk	250,000,000	
1.02.1.02.01.XX	Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan tradisonal, komplementer	Dinas Kesehatan	25 Pusk	25,000,000			25 Pusk	155,000,000	

		diwilayah Kerja Puskesmas							
		Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	100 orang				100 orang	175,000,000
1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Outcome : Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat			270,000,000				456,585,000
1.02.01.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Tersusunnya peta informasi masyarakat kurang gizi dan diketahuinya status gizi balita	Dinas Kesehatan	25 Pusk	20,000,000	APBD		25 Pusk	38,960,000

		Terlaksananya pertemuan sosialisasi gizi	Dinas Kesehatan	50 orang				50 orang	
1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Pemberian PMT Pemulihan pada Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan PMT Bumil KEK dan MP ASI pada baduta Gakin	Dinas Kesehatan	150 orang	150,000,000	APBD		150 orang	157,400,000
		Terlaksananya pertemuan tentang makanan tambahan	Dinas Kesehatan	50 orang				50 orang	
1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian sadar gizi	Terlaksananya pertemuan pencapaian keluarga sadar gizi	Dinas Kesehatan	100 orang	50,000,000	APBD		100 orang	85,000,000

1.02.01.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program gizi	Terlaksananya monitoring fasilitatif kegiatan PMBA dan KP ASI	Dinas Kesehatan	375 orang	50,000,000	APBD		375 orang	175,225,000	
		Terlaksananya pertemuan review program	Dinas Kesehatan	34 orang				34 orang		
1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Outcome : Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat di pemukiman			155,000,000				453,750,000	
1.02.01.21.05	Survalians Kualitas Air	Jumlah sampel air bersih yang diambil kelokasi dan dikirim ke labkesda	Dinas Kesehatan	200 sampel	30,000,000	APBD		125 sampel	75,000,000	
1.02.01.21.09	Replikasi Pamsimas	Terpantaunya pengguna air bersih	Dinas Kesehatan	22 korong	25,000,000	APBD		3 korong	56,250,000	

		dan sarana sanitasi dimasyarakat							
1.02.01.21.10	Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat	Terlaksananya pertemuan dalam rangka Kabupaten Sehat	Dinas Kesehatan	17 kecamatan (103 nagari)	75,000,000	APBD		220 orang	225,000,000
1.02.01.21.12	Nagari Bebas Jentik	Meningkatnya kesehatan lingkungan dari jentik nyamuk	Dinas Kesehatan	103 nagari	25,000,000	APBD		220 orang	97,500,000
1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			550,000,000				1,264,900,000

		Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular							
		Outcome : Meningkatnya surveilan penyakit dan penanggulangan wabah							
1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya kegiatan pertemuan RVS Kusta, KPD Kusta, OJT Kusta, POD Kusta, TB, HIV AIDS, DBD, Diare, ISPA dan monev program P2P	Dinas Kesehatan	925 orang	125,000,000	APBD		925 orang	400,000,000

		Terlaksananya penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya keberhasilan pengobatan TB Paru secara cepat	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya penemuan kasus HIV-AIDS	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya pengetahuan HIV-AIDS pada anak umur > 15 tahun	Dinas Kesehatan	250 orang				250 orang		
		Terlaksananya kegiatan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS di	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk		

		Puskesmas							
		Terlaksananya kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	
		Terlaksananya penemuan kasus diare per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	
		Terlaksananya penemuan kasus baru kusta secara dini	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	
1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi	Outcome : Meningkatnya cakupan imunisasi dasar pada bayi	Dinas Kesehatan	95%	150,000,000	APBD		95%	340,180,000

		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi (UCI) pada tingkat korong	Dinas Kesehatan	88%				88%		
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	92%				92%		
		Outcome : Tersedianya cakupan BIAS campak pada anak SD/MI kelas I	Dinas Kesehatan	95%				95%		
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi DT, TD, BIAS pada	Dinas Kesehatan	95%				95%		

		anak SD/MI kelas 1, 2, 3							
		Outcome : Tercapainya imunisasi TT2 + WUS 85%	Dinas Kesehatan	85%				85%	
		Outcome : Tercapainya cakupan imunisasi lanjutan pada balita	Dinas Kesehatan	85%				85%	
		Terlaksananya monev imunisasi Puskesmas di Puskesmas		25 Pusk				25 Pusk	
		Terlaksananya pertemuan imunisasi MR tingkat Puskesmas dan Kecamatan		25 Pusk				25 Pusk	

		Terlaksananya pertemuan sosialisasi MR tingkat Kab dan Kec		25 Pusk				25 Pusk	
1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Outcome : AFP rate pada anak usia kurang dari 15 tahun 2/100.000 dan penanganan KLB dalam kurun waktu 24 jam	Dinas Kesehatan	100%	100,000,000	APBD		100%	100,000,000
		Outcome : Cakupan desa/kelurahan/korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Dinas Kesehatan	100%				100%	

		Outcome : Terlacaknya setiap kasus PD3I atau kejadian penyakit yang mengakibatkan wabah atau kejadian luar biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	100%				100%		
		Outcome : Respon sinyal kewaspadaan dalam SKDR	Dinas Kesehatan	75%				75%		
		Terlaksananya monev KLB di Puskesmas		25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya pelacakan KLB		25 Pusk				25 Pusk		
		Terlaksananya pengambilan spesimen campak dan mengantarkan ke propinsi		25 Pusk				25 Pusk		

1.02.01.22.14	Pengendalian penyakit tidak menular	Outcome : Meningkatnya cakupan puskesmas yang melaksanakan PTM Terpadu	Dinas Kesehatan	50%	100,000,000.00	APBD		30%	124,720,000.00	
		Out come : Meningkatnya cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	Dinas Kesehatan	50%				30%		
		Outcome : Meningkatnya persentase perempuan usia 30 - 50 th yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Dinas Kesehatan	50%				30%		

		Outcome : Meningkatnya cakupan kawasan tanpa rokok (KTR), minimal 50 % sekolah	Dinas Kesehatan	50%				30%		
		Terlaksananya monev program PTM tingkat Kabupaten	Dinas Kesehatan	125 org				70 orang		
		Terlaksananya workshp peningkatan kapasitas SDM penanggung jawab program PTM	Dinas Kesehatan	125 org				70 orang		
		Terlaksananya Workshp pengaruh rokok terhadap kesehatan Jantung	Dinas Kesehatan	115 org				70 orang		

		Terlaksananya workshp kanker serviks dan pemeriksaan IVA di tingkat Kabupaten	Dinas Kesehatan	137 org				70 Orang		
		Terlaksananya supervisi dan bimbingan teknis program PTM	Dinas Kesehatan	25 pusk x 2 org x 2 kl				70 orang		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas kader posbindu puskesmas	Dinas Kesehatan	25 pusk x3 org						
		Tersedianya ATK dan Sarana Pendukung untuk Pelaksanaan program pencegahan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	12 Bln						

		Tersedianya blanko skreening Faktor resiko PTM /KMS FR-PTM	Dinas Kesehatan	2 Rim					
		Terlaksana Supervisi dan Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian PTM di Puskesmas	Dinas Kesehatan	25 Pusk					
		Tersedianya carta Prediksi Resiko WHO (SEAR B)	Dinas Kesehatan	2 Rim					
		Tersedianya leaflet , baner, spanduk PTM	Dinas Kesehatan	25 pusk					
1.02.01.22.XX	Pengendalian penyakit bersumber binatang	Outcome : Meningkatnya pengendalian penyakit bersumber	Dinas Kesehatan		75,000,000	APBD			300,000,000

		binatang							
		Terlaksananya sosialisasi pengendalian penyakit bersumber binatang	Dinas Kesehatan	807 orang			807 orang		
		Terlaksananya penemuan kasus malaria per 100 penduduk	Dinas Kesehatan	25 Pusk			25 Pusk		
		Terlaksananya penemuan kasus DBD per 100 penduduk	Dinas Kesehatan	25 Pusk			25 Pusk		
		Terlaksananya kegiatan eliminasi rabies	Dinas Kesehatan	25 Pusk			25 Pusk		

		Terlaksananya sosialisasi kegiatan penanggulangan penyakit filariasis dan kecacingan	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	
		Tersedianyan mesin fogging	Dinas Kesehatan						
1.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Outcome : Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan			150,000,000				650,000,000
1.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya reakreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	8 Pusk	50,000,000	APBD		6 Pusk	150,000,000

1.02.01.23.12	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan Puskesmas paska akreditasi	Puskesmas	25 Pusk	100,000,000	DAK		10 Pusk	500,000,000	
		Terakreditasi ulangannya Puskesmas yang telah 3 tahun	Puskesmas	Pusk						
1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan			12,550,000,000				11,803,511,000	
1.02.01.25.01	Pembangunan Pagar Puskesmas Patamuhan	Terjaganya keamanan Puskesmas	Patamuhan	1 Paket	-	APBD	POKIR	1 Paket		

1.02.01.25.01	Pagar Dinas Kesehatan	Terlaksananya pembangunan Pagar Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	350,000,000	APBD				
1.02.01.25.XX	Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/Puskemas pembantu dan jaringannya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	Pengadaan Incenerator	1 Paket	2,000,000,000	DAK		1 Paket	6,000,000,000	
1.02.01.25.24	Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/Puskemas pembantu dan jaringannya (DAK)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	1 Paket	6,650,000,000	DAK		1 Paket	5,003,511,000	
1.02.01.25.25	Administrasi kegiatan DAK pembangunan sarana prasarana Puskesmas dan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan	Dinas Kesehatan	1 Paket	750,000,000	DAK		1 Paket	750,000,000	

	Jaringannya	Jaringannya								
1.02.01.25.XX	Pengadaan Kesehatan	Alat Tersedianya alat kesehatan untuk puskesmas (kursi gigi, hematologi analizer dan cryoterapi kit)	Dinas Kesehatan	1 Paket	2,800,000,000	DAK		1 Paket	50,000,000	
1.02.01.28.	Program peningkatan pelayanan kesehatan	Program Kemitraan Outcome : Meningkatnya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin			165,000,000				8,600,000,000	
		Outcome : Meningkatnya jaminan kesehatan bagi masyarakat								

1.02.01.28.01	Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbat Sakato (JKS Sakato)	Terjaminnya masyarakat miskin Kabupaten Padang Pariaman pada program JKN	Dinas Kesehatan	1 Paket	-	APBD		1 Paket	5,000,000,000	
1.02.01.28.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan pelayanan kesehatan	Terlaksananya evaluasi, monitoring dan pelaporan kemitraan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	15,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000	
1.02.01.28.10	Jaminan Pelayanan Kesehatan Papa Tangkas Gada 119	Terjaminnya masyarakat yang gawat darurat dilingkungan Kab. Padang Pariaman	Dinas Kesehatan	1 Paket	150,000,000	APBD		1 Paket	3,500,000,000	
1.02.01.16.xx	Operasional P3K	Terjaminnya Peserta event dalam beberapa kegiatan	Dinas Kesehatan	17 Kec	84,000,000	APBD		17 Kec	100,000,000	

1.02.01.30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Outcome : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat			50,000,000				120,000,000
1.02.01.30.01	Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Terbentuknya kelompok kerja lansia tingkat Kecamatan	Dinas Kesehatan	17 Kec	50,000,000	APBD		17 Kec	120,000,000
		Terbentuknya Puskesmas Santun Lansia dan Puskesmas Ramah Lansia	Dinas Kesehatan	12				12	
		Terbentuknya tiap nagari satu posyandu percontohan lansia	Dinas Kesehatan	60				60	
		Terlaksananya monev lansia	Dinas Kesehatan	25 Pusk				25 Pusk	

1.02.01.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Outcome : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat			410,000,000				1,700,000,000
1.02.01.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas	Terlaksananya workshop penanganan komplikasi terhadap ibu hamil, persalinan dan nifas	Dinas Kesehatan	170 orang	130,000,000	APBD		170 orang	250,000,000
		Terlaksananya pertemuan sosialisasi ANC terpadu dan buku KIA pada lintas sektor dan lintas program	Dinas Kesehatan	120 orang				120 orang	
		Terlaksananya pertemuan AMP dan audit medik KB	Dinas Kesehatan	145 orang				145 orang	
		Terlaksananya monitoring dan	Dinas Kesehatan	440 orang				440 orang	

		evaluasi								
1.02.01.32.05	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja	Terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor penjaringan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja	Dinas Kesehatan	106 orang	50,000,000	APBD		106 orang	150,000,000	
		Terdeteksi kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Dinas Kesehatan	2 Kec				2 Kec		
		Terlaksananya lomba sekolah tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Dinas Kesehatan	125 orang				125 orang		
1.02.01.32.06	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang Program Kesehatan	Terlatihnya petugas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	96 orang	50,000,000	APBD		96 orang	100,000,000	

	Peduli Remaja (PKPR)	remaja							
		<p>Terdeteksinya masalah remaja (SMP dan SMA) berkaitan dengan perilaku resiko Napza, Kesehatan Produksi dan IMS/ HIV AIDS)</p>	Dinas Kesehatan	250 orang				250 orang	
		<p>Tersosialisasinya standar nasional PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)</p>	Dinas Kesehatan	96 orang				96 orang	

		Terlatihnya kader kesehatan remaja SMP dan SMA sederajat 10 % dari jumlah murid	Dinas Kesehatan	240 orang				240 orang	
1.02.01.32.XX	Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB	Terlaksananya pertemuan dengan lintas sektor (PKK, KB Kes, TNI KB Kes, IBI KB Kes)	Dinas Kesehatan	1 paket	40,000,000	APBD			300,000,000
1.02.01.32.09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pertemuan pembentukan forum peduli KIA	Dinas Kesehatan	40 orang	40,000,000	APBD		40 orang	300,000,000
		Terlaksananya program papa sehat	Dinas Kesehatan	40 orang	50,000,000	APBD			300,000,000
		Terlaksananya program papa dorda	Dinas Kesehatan	40 orang	50,000,000	APBD			300,000,000

		Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA dan penguatan sistem pelayanan di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	400 orangz				400 orang		
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAPA Sehat	Dinas Kesehatan	225 orang				225 orang		
		Terlaksananya review DDTK, MTBM/S dan pembinaan program	Dinas Kesehatan	120 orang				120 orang		

RENCANA KERJA 2020

Catatan :

1. Anggaran JKN pembayaran Premi untuk tahun 2020 tidak dianggarkan lagi
2. Sebanyak Rp. 5,7 Milyar dengan jumlah peserta 20.062 jiwa yang merupakan MOU Bupati dengan BPJS
3. Anggaran program yang diusulkan di Renja 2020 dimanfaatkan untuk pencapaian SPM sesuai dengan PMK No 4 Tahun 2019

Parit Malintang, Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan,



Drs.H. Yutiardy Rivai, Apt

NIP 19630905 199003 1001

